

Analisis Koizumi Doctrine dalam
Konteks Persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Melati Patria Indrayani, S. Sos
0706191884



UNIVERSITAS INDONESIA
Fakultas Pascasarjana
Program Studi Kajian Wilayah Jepang
Kekhususan Diplomasi Jepang
Depok
Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Melati Patria Indrayani, S.Sos

NPM : 0706191884

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Melati Patria Indrayani, S.Sos
NPM : 0706191884
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul Tesis : Analisis *Koizumi Doctrine* dalam Konteks
Persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Syamsul Hadi, PhD
Pembimbing : Dr. Sudung Manurung
Penguji : Tirta Mursitama, PhD
Penguji : Prof. Dr. Noerhadi Magetsari

(
(
(
(

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 15 Juli 2009



KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Jurusan Diplomasia Jepang pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Syamsul Hadi PhD dan Bapak Dr. Sudung Manurung selaku para dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dan membimbing dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Bapak Tirta Mursitama PhD dan Bapak Prof. Dr. Noerhadi Magetsari selaku para dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberi masukan pada tesis ini;
- (3) Para sahabat seperjuangan (Agus, Fery, Eli dan Mbak Citra) serta staf jurusan Kajian Wilayah Jepang UI yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu atas bantuan yang selama ini telah diberikan;
- (4) Para rekan kerja di kantor yang juga sudah memberikan *support*, kesabaran dan kepercayaan untuk menyelesaikan tesis ini;
- (5) Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material dan moral: Mama, Papa, Abi, Piyang, Doni, Ica dan Aldi serta seluruh keluarga besar saya. Serta tak lupa untuk Ari dan keluarga yang juga telah banyak memberikan motivasi dan doa untuk tesis ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. Amin.

Depok, 15 Juli 2009

Melati Patria Indrayani, S.Sos

**HALAMAN PERNYATAAN PERSTUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati Patria Indrayani, S.Sos
NPM : 0706191884
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Kekhususan : Diplomasi Jepang
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Koizumi Doctrine dalam Konteks
Persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan



(Melati Patria Indrayani, S.Sos)

ABSTRAK

Nama : Melati Patria Indrayani, S.Sos
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul : Analisis *Koizumi Doctrine* dalam Konteks Persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN

Tesis ini membahas mengenai kebijakan *Koizumi Doctrine* yang dikeluarkan pada tahun 2002 oleh Jepang dua bulan setelah negara-negara ASEAN menyepakati suatu perjanjian kerjasama dengan Cina di tahun 2001 mengenai FTA. Baik Jepang maupun Cina memiliki sejarah hubungan yang kurang baik sehingga situasi ini juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara yang mereka keluarkan sebagai implikasi dari kepentingan nasional masing-masing negara.

Berdasarkan hubungan dan sejarah yang kurang baik dari Jepang dan Cina maka terciptalah suatu bentuk persaingan yang merupakan wujud dan upaya Jepang dan Cina di dalam memperoleh *power* di dunia. Salah satu cara untuk mencapai kekuatan ini, baik Jepang maupun Cina mencoba untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh (*influence*) mereka di ASEAN. Jepang yang tadinya sudah memiliki kekuatan dengan memimpin perekonomian di ASEAN pasca PD II, di tahun 2000-an harus menghadapi saingan baru yakni Cina

Kata kunci:
Pengaruh, Kepentingan Nasional, Rivalitas

ABSTRACT

Name : Melati Patria Indrayani, S. Sos
Study Program : Kajian Wilayah Jepang
Title : The Koizumi Doctrine Analysis of Japan – China Rivalry in
Association of Southeast Asia Nation

The focus of this study is about a doctrine that made by the Japan Government called The Koizumi Doctrine that release in 2002, exactly two months after the ASEAN countries made a partnership with China's Government called the FTA (Free Trade Area) in 2001. Japan and China have a history in their relationship that not quite good. Basically both nations tried to make a better statement in the world based on their national interest.

Based on their long relationship that not going well through the times between Japan and China come up with a rivalry where both nations want to have more power by given their influence as the economic leader in ASEAN. Japan was had that position before, but after the year of 2000, China became much powerful nation and tried to also spread their influence in ASEAN. Facing this situation, means, Japan meet has to face his rivalry, China.

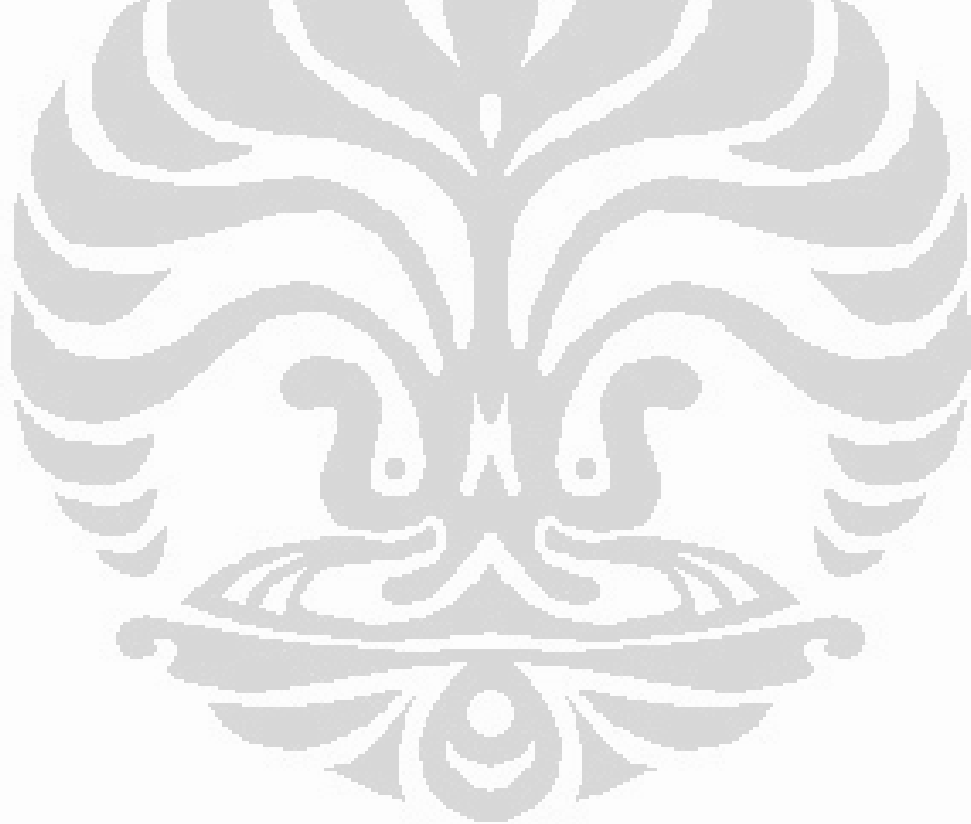
Key words:
Influence, National Interest, Rivalry

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.1.1 ASEAN + 3.....	3
I.1.2 Jepang sebagai Partner ASEAN.....	6
I.2. Rumusan Permasalahan.....	13
I.3. Tujuan Penelitian.....	14
I.4. Signifikansi Penelitian.....	14
I.5. Kerangka Penelitian.....	14
I.5.1 Perebutan Pengaruh.....	15
I.5.2 Kepentingan Nasional (<i>National Interest</i>).....	16
I.5.3 Tujuan dari Diplomasi.....	17
I.6. Metode Penelitian.....	18
I.7. Sistematika Penulisan.....	18
II. Koizumi Doctrine dalam Konteks Kebijakan Luar Negeri Jepang... 19	19
II.1 Kebijakan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia II.....	19
II.1.1 Yoshida Doctrine.....	19
II.1.2 Fukuda Doctrine.....	21
II.2 Kebijakan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dingin.....	24
II.2.1 Miyazawa Doctrine.....	25
II.3 Kebijakan Luar Negeri Jepang Pasca Krisis Asia 1997.....	29
II.3.1 Koizumi Doctrine.....	32
III. Hubungan Jepang-Cina di Kawasan Regional ASEAN..... 36	36
III.1 Hubungan Jepang dengan ASEAN.....	36
III.2 Hubungan Cina dengan ASEAN.....	43
III.2.1 Kebangkitan Cina.....	45
III.3 Hubungan Jepang-Cina di ASEAN.....	51
III.3.1 Tahapan hubungan Jepang – Cina – ASEAN.....	58
III.4 Koizumi Doctrine: Persaingan Jepang-Cina di ASEAN.....	61
IV. Penutup..... 65	65
DAFTAR REFERENSI.....	67
LAMPIRAN.....	76

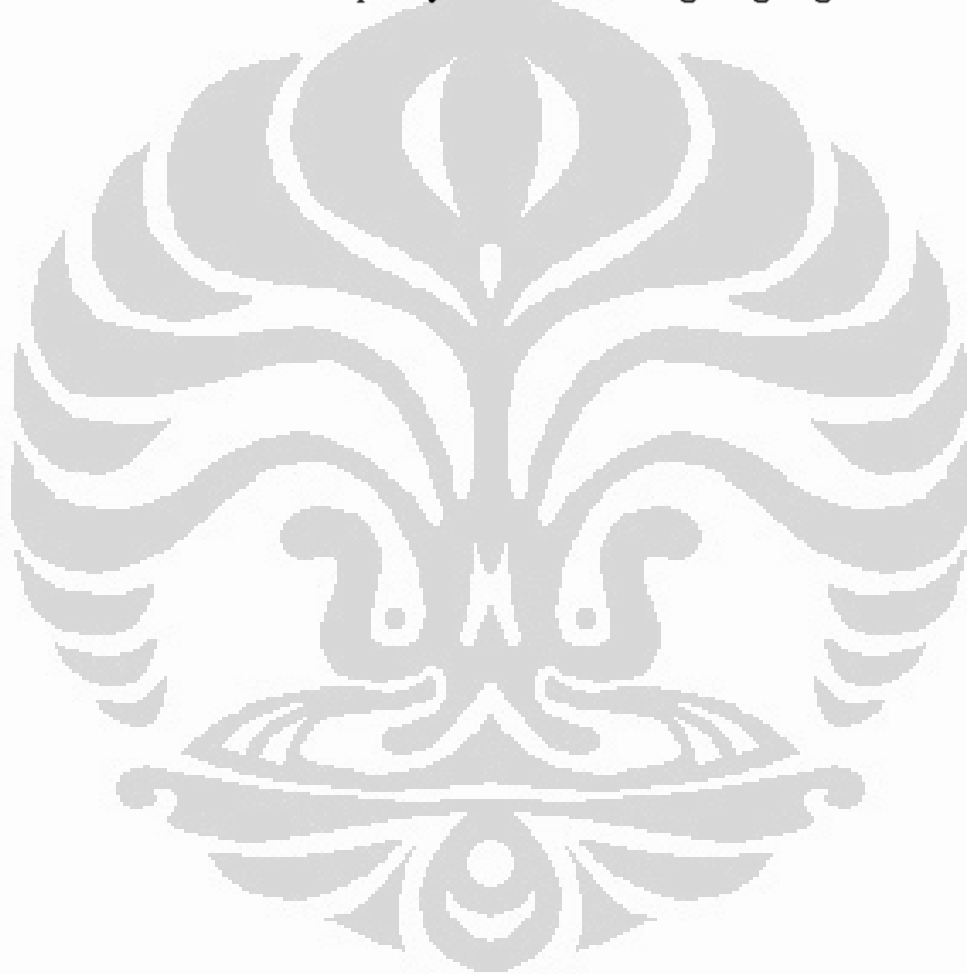
DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Progres in ASEAN + 3.....	5
Gambar I.2	<i>Developments leading to East Asia Summit (EAS) and Future Plans.....</i>	6
Gambar II.1	<i>ASEAN Forum Regional (ARF).....</i>	27
Gambar II.2	<i>Theme of Japan's Economic Foreign Policy.....</i>	31
Gambar III.1	<i>Japan and ASEAN.....</i>	39
Gambar III.2	<i>Japan's Export to US and China and Japan's Import from US and China.....</i>	42
Gambar III.3	<i>China's Economic Growth.....</i>	47
Gambar III.5	<i>Record of Japan's ODA to China.....</i>	53
Gambar III.4	The Issue of Resource Development in the East China Sea.....	58



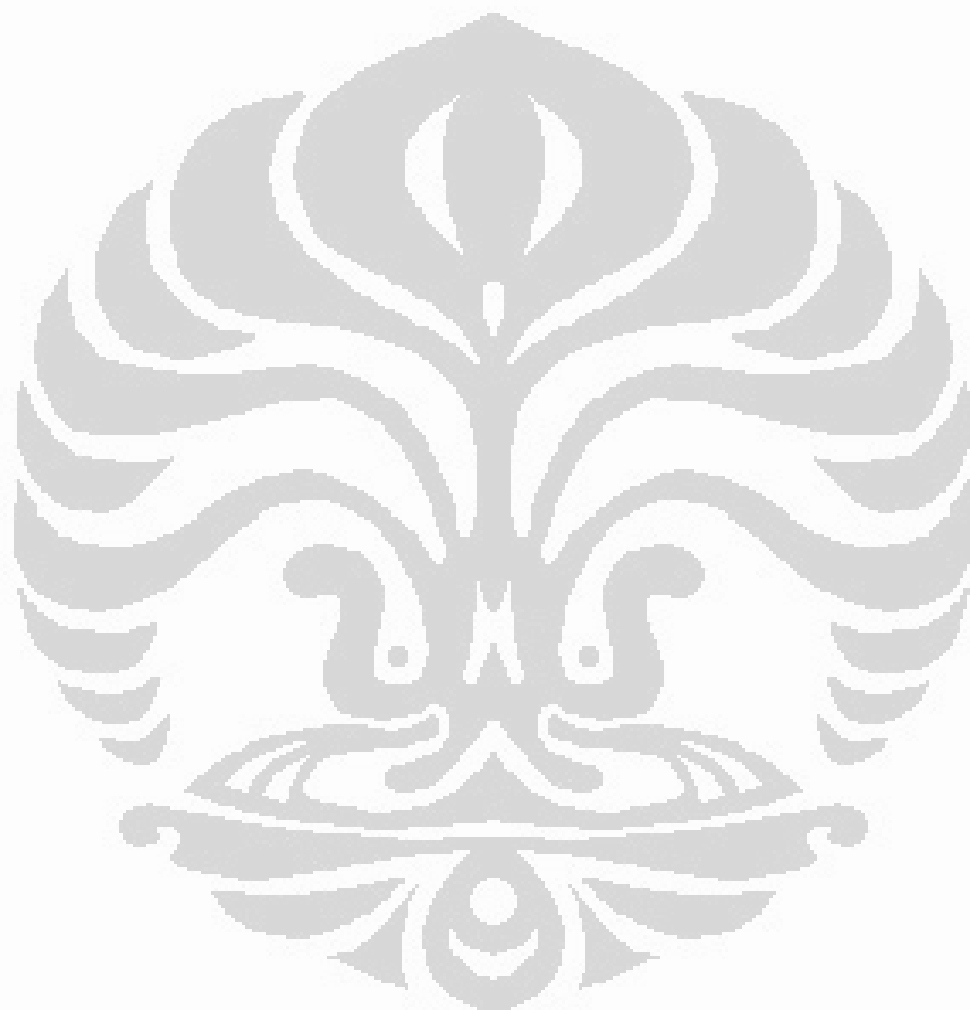
DAFTAR TABEL

Tabel I.1	<i>Japanese Financial Contributions to the Asian Crisis Compared to Other Major Powers (by mid 1998)</i>	7
Tabel I.2	<i>The Total Number of Japanese Assistance for Crisis Recovery in Asia (1997-1999)</i>	8
Tabel I.3	<i>A Comparison of Four Major Powers</i>	11
Tabel III.1	Distribusi Regional ODA Jepang.....	40
Tabel III.3	Indeks Kepercayaan Investasi Asing Langsung.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	<i>Koizumi Doctrine</i>	76
------------	-------------------------------	----



BAB I

Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang menimpa Asia Tenggara di tahun 1997 sempat menimbulkan keraguan dunia terhadap peranan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) dan *Asia Pasific Economic Community* (APEC), yakni dua lembaga yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Asia Tenggara. Krisis ini secara tidak langsung juga telah memberikan gambaran dari ASEAN yang secara kelembagaan ternyata belum mampu menghadapi gelombang krisis keuangan yang cukup besar. Penting untuk dilihat bahwa di dalam krisis ini, negara Jepang dan Cina ternyata tampil lebih meyakinkan dibandingkan dengan negara Amerika yang berdiri di belakang *International Monetary Fund* (IMF). Kedua negara Asia tersebut cenderung lebih bersahabat terhadap negara-negara ASEAN, terutama dengan negara-negara ASEAN yang paling parah kondisinya akibat dari krisis ini yakni Thailand dan Indonesia. Sementara itu Amerika dengan IMF cenderung dinilai memaksakan kebijakan-kebijakan penghematan yang justru memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia contohnya¹.

Kurang lebih enam tahun setelah krisis berlalu, ASEAN kembali muncul sebagai organisasi regional yang telah pulih dari krisis ekonomi. ASEAN kemudian menyelenggarakan pertemuan puncak ke sembilan di Bali tepatnya di tahun 2003 yang disebut juga sebagai *Bali Concord II*. Melalui pertemuan ini dideklarasikan kesungguhan ASEAN untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, politik, dan sosial yang direncanakan akan dapat dicapai di tahun 2020 nanti dan dalam penggunaan kalimat yang lebih halus, tujuan-tujuan ini dirangkum dalam apa yang kemudian dikenal sebagai *Asean Community* yang terdiri dari tiga pilar utama².

Pilar pertama adalah *Asean Security Community* (ASC). Konsep yang awalnya diajukan oleh negara Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan

¹ Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Pustaka Pelajar, 2007, Hlm. 81

² Bambang Cipto, Hlm. 81

kerjasama politik dan keamanan antar negara anggota ASEAN. Ancaman terorisme yang sedang ramai terjadi dan implikasinya terhadap ASEAN merupakan pendorong utama mengapa ASEAN perlu mengembangkan *Asean Security Community* (ASC).

Pilar kedua adalah *Asean Economic Community* (AEC). Pendukung utama dari konsep *ASEAN Economic Community* ini adalah Singapura dan juga Thailand yakni dua negara ASEAN yang tergolong maju perekonomiannya. Kedua negara ini menganggap bahwa kemajuan Cina dan India dalam bidang ekonomi, dan juga kemampuan mereka menyerap investasi asing, akan berubah menjadi sebuah ancaman jika negara-negara ASEAN tidak segera mengambil langkah antisipasi terhadap kemajuan kedua negara tersebut. Untuk itu perlu dibentuk sebuah wadah yang bisa memfasilitasi peningkatan perekonomian di ASEAN. *Asean Economic Community* (AEC) juga dibentuk sebagai reaksi ASEAN terhadap kemajuan negara Cina dan India yang sangat mudah dalam menarik investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI)³. Di samping itu, Cina dan India yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar manusia jelas jauh lebih menarik investor asing dibandingkan dengan ASEAN. *Asean Economic Community* (AEC) sangat diharapkan akan membuat ASEAN mampu menarik kembali arus investasi asing langsung yang mulai mengarah ke kedua negara raksasa tersebut.

Pilar ketiga adalah *ASEAN Social and Cultural Community* (ASCC) atau yang lebih banyak ditujukan khusus untuk warga ASEAN saja. Fokus ini dimaksudkan agar ASEAN mampu bekerjasama untuk menanggulangi persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan penduduk, sumber daya manusia, pendidikan, lingkungan dan kesehatan⁴. Dengan kata lain, dengan adanya *ASEAN Social and Cultural Community* diharapkan akan mampu mengangkat derajat dan martabat serta kesejahteraan penduduk ASEAN yang selama ini kurang mendapat perhatian.

³ Denis Hew, "Southeast Asian Economies: Toward Recovery and Deeper Integration", *Southeast Asian Affairs 2005*, Singapore: ISEAS, 2005, Hlm. 55.

⁴ Weatherbee, Donald E. *International Relations in Southeast Asia the Struggle for Autonomy*, Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., 2005, Hlm. 108.

I.1.1 ASEAN + 3

Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara ASEAN tahun 1997 juga menyebabkan munculnya kelompok negara baru yang melibatkan ASEAN dan tiga negara Asia lain: Cina, Jepang, dan Korea Selatan yang kemudian dikenal sebagai ASEAN + 3 (APT). Gagasan pembentukan ASEAN + 3 sendiri pada awalnya merupakan gagasan dari pemikiran seorang Mahathir Muhammad di tahun 1990 yang bermula dalam bentuk wacana *East Asia Economic Grouping* (EAEG)⁵. Pemikiran ini sendiri didasari oleh keprihatinan Mahathir terhadap adanya dominasi negara Amerika di dalam bidang ekonomi dan juga disebabkan oleh keinginan Malaysia sebagai bangsa Asia yang mengharapkan adanya pembentukan blok regional baru sebagai konsekuensi logis dari era pembentukan blok perdagangan yang pernah ada pada awal tahun 1990-an.

East Asia Economic Grouping (EAEG) yang kemudian dirubah menjadi *East Asia Economic Caucus* (EAEC) ternyata mengundang protes pihak yang menganggap kehadiran kelompok ini sebagai blok perdagangan “tandingan” di Asia. Hal ini disebabkan karena pada saat yang bersamaan, negara Amerika juga sedang memantapkan sebuah proses pembentukan *North America Free Trade Area* (NAFTA) yang melibatkan Amerika, Kanada dan Meksiko⁶. Tidak mengherankan jika terdapat pemikiran serupa yang berkembang di Asia akan dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan ekonomi Amerika di Asia. Sementara pada waktu yang hampir bersamaan juga, baik Amerika maupun Australia juga sedang mendukung perkembangan APEC yang diharapkan akan stabil di bawah kendali Amerika.

Untuk mendukung sikapnya tersebut Amerika akhirnya melancarkan tekanan terhadap Jepang dan Korea Selatan agar pemikiran Mahathir tersebut tidak berkembang lebih luas⁷. Walaupun kedepannya pemikiran Mahathir ini mendapatkan dukungan negara-negara Asia, proses pengembangan APEC lewat pertemuan pertama di Seattle di tahun 1993 dan pertemuan kedua di Jakarta pada tahun 1994 dengan cepat membekukan proses pembentukan *East Asia Economic*

⁵ Bambang Cipto, Hlm. 76.

⁶ Bambang Cipto, Hlm. 77.

⁷ Richard Stubbs, “ASEAN plus Three: Emerging East Asian Regionalism,” *Asian Survey*, Vol. XLII, No. 3, May/June 2002, Hlm. 441.

Caucus (EAEC). Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Asia di tahun 1997, akhirnya memperkuat pondasi bagi dihidupkannya kembali pemikiran tentang *East Asian Economic Caucus* (EAEC) yang kemudian memotivasi pembentukan ASEAN + 3.

Pertemuan ASEAN + 3 pertama berlangsung di Kuala Lumpur tepatnya pada bulan Desember 1997 disaat Asia sedang memasuki awal krisis finansial. Perubahan yang berlangsung cepat paska krisis ekonomi Asia juga akhirnya mempengaruhi dinamika pertumbuhan ASEAN + 3. Pada pertemuan puncak ASEAN + 3 di Hanoi tahun 1998, Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung, mengusulkan dibentuknya *East Asian Vision Group* (EAVG) yang terdiri dari 26 pakar sipil (*eminent persons*) yang ditugaskan untuk mengembangkan upaya kerjasama diatas⁸. Dua tahun kemudian *East Asia Study Group* (EASG) dibentuk dengan tugas utama menyempurnakan hasil kajian dari *East Asian Vision Group* (EAVG). Kemudian pada pertemuan ASEAN + 3 pada tahun 2002, *East Asian Vision Group* (EAVG) menyerahkan hasil rekomendasi yang telah disusun berdasarkan kajian *East Asian Vision Group* (EAVG) dimana dalam pertemuan ASEAN + 3 tahun berikutnya disepakati untuk mengembangkan pemikiran mengenai Pasar Bebas Asia Timur.

Terobosan yang diprakasai oleh ASEAN ini dilihat bukan tanpa akan adanya masalah dan hambatan. Diantaranya terdapat beberapa persoalan yang menghadang masa depan ASEAN + 3⁹. *Pertama*, Cina dan Jepang merupakan dua negara Asia dengan aspirasi kepemimpinan yang sangat kuat. Isu sejarah masa pendudukan Jepang di Cina dan persaingan ekonomi kedua negara semakin mempertajam kompetisi keduanya di kawasan ASEAN. *Kedua*, perbedaan kekuatan ekonomi anggotanya juga merupakan persoalan besar karena tidak sama dan dapat menimbulkan permasalahan di dalam persaingan ekonomi antara mereka. *Ketiga*, negara-negara ASEAN sendiri cenderung mengembangkan kerjasama bilateral. Sebagai contoh Singapura sekalipun sangat mendukung realisasi *ASEAN Free Trade Area*, akan tetapi tetap sangat aktif mengembangkan

⁸ Hadi Soesatro, 'Toward An East Asian Regional Trading Agreement', dalam *Reinventing ASEAN*, diedit oleh Simon C. Tay, Jesus P. Estanislaos, Hadi Soesat, Singapura, ISEAS, 2001, Hlm. 227.

⁹ Bambang Cipto, Hlm. 79.

kerjasama bilateral dengan Jepang (2002), Selandia Baru dan *European Free Trade Area*¹⁰. Persoalan-persoalan di atas tampaknya bisa menjadi salah satu penghambat kemajuan dan perkembangan ASEAN + 3 untuk kedepannya.

Berikut adalah data-data yang ditulis di dalam Japan's Diplomatic BlueBook 2006 mengenai perkembangan dari ASEAN+3 menuju *East Asia Summit* (EAS)¹¹:

Gambar I.1

Progress in ASEAN+3 Cooperation	
Promotion of ASEAN+3 Cooperation	Related events
<ul style="list-style-type: none"> • 1997: 1st ASEAN+3 Summit Meeting 	<ul style="list-style-type: none"> • 1997: Asian currency crisis
<ul style="list-style-type: none"> • 1999: Joint Statement on East Asia Cooperation (Third ASEAN+3 Summit Meeting) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1997: ASEAN Vision 2020 —1998: Hanoi Action Plan
<ul style="list-style-type: none"> • 2001: East Asia Vision Group Report (ASEAN+3 evolves into EAS) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1999: ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Deputies Meeting • 1999: Establishment of ASEAN 10 (accession by Cambodia)
<ul style="list-style-type: none"> • 2002: East Asia Study Group Report (EAS as a medium to long-term measure) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001: September 11 terrorist attacks in the US
<p>Japan: Submitted Issues Paper on EAC, functional cooperation, and EAS.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2002: Prime Minister Koizumi's speech in Singapore "Community that walks together and advances together" • 2002: India-ASEAN Summit
<ul style="list-style-type: none"> • 2004: 5th ASEAN+3 Foreign Ministers' Meeting (Jakarta) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2003: ASEAN-Japan Commemorative Summit, Tokyo Declaration • China-ASEAN Strategic Partnership Declaration • Bali Concord II
<ul style="list-style-type: none"> • 2004: 8th ASEAN+3 Summit Meeting (Vientiane) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2004: Australia-New Zealand-ASEAN Summit (Vientiane)
<p>Decision to hold an East Asia Summit Meeting</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2005: ASEAN-sponsored Emergency Summit Meeting (Assistance to tsunami disaster: Jakarta) • Russia-ASEAN Summit (Kuala Lumpur)
<ul style="list-style-type: none"> • 2005: 9th ASEAN+3 Summit Meeting (Kuala Lumpur) 	
<p>Agreed to formulate</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 2007: 2nd Joint Statement on East Asia Cooperation to be adopted 	

Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

Dapat dilihat melalui data-data diatas bahwa adanya kesinambungan dan korelasi dari krisis yang melanda Asia di tahun 2007 dan dimulainya pertemuan ASEAN + 3. Pertemuan ini juga yang kemudian berkembang menjadi suatu bentuk kerjasama untuk negara-negara ASEAN di dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang melanda negaranya.

¹⁰ Stubbs, Hlm. 452.

¹¹ Lihat pada *Japan's Blue Book 2006* yang diakses melalui www.mofa.go.jp.

Gambar I.2

Developments Leading to the East Asia Summit (EAS) and Future Plans



Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

Sedangkan berdasarkan data-data di atas digambarkan proses dari ASEAN + 3 menuju *East Asia Summit* (EAS) dan apa saja yang menjadi agenda penting dari pertemuan-pertemuan tersebut.

I.1.2 Jepang sebagai partner ASEAN

Melalui krisis Asia di tahun 1997 ini, perekonomian negara-negara anggota ASEAN menghadapi suatu masa yang berat. Pada masa inilah keberadaan Jepang menjadi salah satu negara yang berperan penting di dalam pemulihan perekonomian negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN yang banyak terpengaruh dengan masalah finansial yang buruk negaranya, pada akhirnya menerima bantuan pinjaman uang yang salah satunya banyak diberikan Jepang melalui *Official Development Aid* (ODA) yang disalurkan ke negara-negara ASEAN tersebut. Melalui bantuan Jepang inilah yang menyebabkan

banyaknya negara ASEAN yang akhirnya mulai bergantung pada Jepang. Berikut merupakan data bantuan Jepang di dalam krisis Asia 1997¹²:

Tabel 1.1
Japanese Financial Contributions to the Asian Crisis Compared to Other
Major Powers (by mid 1998)

Japan	United States
Total: \$ 42 billion	Total: \$ 11 billion
1. Financial aid with IMF: \$ 19 billion	1. Financial aid: \$ 8 million
2. Trade Insurance: \$ 15 billion	2. Trade insurance: \$ 2.75 billion
3. Jexim: \$ 7.5 billion	3. Others : \$ 400 million
4. Others: \$ 1 billion	
Europe	China
Total: \$ 5.4 billion	Total: \$ 1.2 billion
1. Financial aid: \$ 5 billion	1. Financial aid: \$ 1 billion
2. Credits: \$ 300 million	2. Trade Insurance: \$ 200 million
3. Economic and Technical cooperation: \$ 50 million	

Source: Internal backgrounds materials prepared by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Economic Cooperation Bureau of Ministers of Foreign Affairs for Japanese Delegation attending Tidewater meeting of aid donors in Washington DC, June, 1998, in Ming Wan, *Japan Between Asia and The West: Economic Power and Strategic Balance*, (New York: M.E. Sharpe, 2001), p. 91.

Berdasarkan data-data di atas dilihat perbandingan antara negara Jepang, Eropa, Amerika dan Cina yang sama-sama memberikan bantuannya kepada negara-negara Asia yang terkena krisis. Jika diperhatikan, maka Jepang menduduki peringkat pertama karena Jepang merupakan negara yang paling banyak memberikan bantuan kepada negara-negara Asia dengan angka yang mencapai 42 milyar dibandingkan dengan 3 negara lainnya.

¹² Indonesian Perspectives, *Japan and the Economic Crisis in Indonesia*, Vol II, No.1, CIRES, 2005, Hlm. 21.

Tabel 1.2
The Total Number of Japanese Assistance for
Crisis Recovery in Asia (1997-1999)

Program	Amount of Assistance	Scheme
Assistance measures for Asia	Approx US \$ 44 Bilion	<ul style="list-style-type: none"> • Financial aid with IMF • Trade Insurance • Two Step Loans • Investment Financing • Human Resources Training and Others
New Miyazawa Initiative	US \$ 30 Bilion	<ul style="list-style-type: none"> • Medium to Long-Term Financial support: • Supporting corporate debt restructuring in the private sector and efforts to make financial system sound and stable • Strengthening the social safety net • Stimulating the Economy • Addressing the credit crunch • Short Term Financial: • Facilitation of Trade Finance • Swap Arrangement
Special Yen Loan Facility	US \$ 5 Bilion	Assistance for infrastructure developments to contribute to economic stimulating, employ-promoting and economic structural reforms.

Source: Internal backgrounds materials prepared by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Economic Cooperation Bureau of Ministers of Foreign Affairs for Japanese Delegation Attending Tidewater meeting of aid donors in Washington DC, June, 1998, in Ming Wan, Japan Between Asia and The West: Economic Power and Strategic Balance, (New York: M. E. Sharpe, 2001), p. 91.

Berdasarkan data-data dari tabel di atas juga diketahui beberapa bentuk bantuan yang diberikan Jepang untuk negara-negara Asia selama tahun 1997-1999. Pada masa inilah Jepang menjadi mitra dan rekan penting bagi pemulihan perekonomian di negara-negara ASEAN.

Ketika Jepang tengah memperkuat hubungannya dengan ASEAN, Cina tiba-tiba muncul menjadi negara yang juga akhirnya memiliki peranan besar di ASEAN. Dalam kurun waktu 13 tahun Jiang Zemin telah memimpin Cina naik tingkat perekonomiannya menjadi 9,3 persen per tahun setelah peristiwa Tian Anmen dan krisis Asia di tahun 1989 sendiri telah memberikan perubahan sistem politik Cina seiring dengan menurunnya kepercayaan terhadap sistem komunis. Suatu bentuk perubahan ideologi negara menjadi *Socialist Democracy* dengan *Chinese Characteristic* yang tidak mau meniru dari Barat¹³.

Pada tahun 1999, perekonomian negara-negara ASEAN kembali pulih yang justru berbanding terbalik dengan perekonomian Amerika Serikat yang memburuk di tahun 2000 dan semakin terpuruk di tahun 2001¹⁴. Setelah itu Cina pun masuk ke dalam *World Trade Organization* (WTO) dan banyak memberikan investasi pada negara-negara ASEAN. Dari sudut ekonomi, keuntungan yang dapat diraih Cina dapat ditafsirkan dengan beberapa tolak ukur. Melalui Bank Dunia, diperkirakan pada tahun 2020 *share* Cina pada perdagangan akan naik tiga kali lipat dari sekarang, mencapai 10 persen¹⁵. Cina akan mengimpor dalam jumlah yang lebih besar, dari beras sampai ke alat semi konduktor. Pada saat yang sama Cina akan mengekspor dalam jumlah yang berlipat barang-barang yang diproduksi dengan padat karya. Menurut perhitungan ini juga, Cina akan menjadi *trading nation* nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (dengan *share* sebesar 12 persen) dan mendahului Jepang (dengan *share* sebesar 5 persen)¹⁶.

Pada tahun 2000, Cina sebagai salah satu mitra penting bagi Asia Tenggara bermaksud untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan Asia

¹³ *East Asian Strategic Review 2003*. The National Institute for Defense Studies Japan, 2003, Hlm. 157.

¹⁴ Jusuf Wannadi, *ASEAN-Japan Relations: The Underpinning of East Asian Peace and Stability dalam ASEAN Japan Cooperation, a Foundation for East Asian Community*. Japan Centre for International Exchange, 2003. Hlm. 4.

¹⁵ Wibowo, I. *Belajar Dari Cina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004, Hlm. 64.

¹⁶ The World Bank, *China 2020: China Engaged*. Washington, DC: The World Bank, 1997, Hlm. 36.

Tenggara melalui Menteri Cina Zhu Rongji. Kemudian dibentuklah *ASEAN - China Expert Group (ACEG)* yang di tahun 2001 menghasilkan laporan yang berisi mengenai pendirian perdagangan bebas yang akan dilakukan dalam sepuluh tahun; memperbanyak volume perdagangan dan investasi; pemberian bantuan teknis dan *capacity building*; memperluas kerjasama dalam beberapa bidang seperti *finance*, pariwisata, pertanian dan perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan UKM, kerjasama industri, perlindungan lingkungan termasuk di dalamnya energi dan pengembangan subregional.

Kemudian diadakanlah *ASEAN - China Summit* pada bulan November 2001 dan penandatanganan kerjasama komprehensif antara ASEAN-Cina baru ditandatangani pada tahun 2002. Keunggulan perjanjian kerjasama ini adalah merupakan paket yang menyatakan liberalisasi dalam bidang pertanian. Implementasi perjanjian ini akan dilakukan pada tahun 2004¹⁷.

Di tahun 2001 Cina juga membuat perjanjian dengan negara-negara ASEAN yang diberi nama *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang bertujuan untuk memperbaiki investasi luar negeri atau investor asing. FTA Cina dengan ASEAN di bulan November 2001 diantaranya menyatakan bahwa dalam waktu 10 tahun kedepan ASEAN akan mengizinkan Cina untuk mengedarkan produknya ke pasar industri ASEAN, selain itu meningkatkan ekspor ASEAN ke Cina dan mendapatkan investasi dari Cina. Dalam kondisi ini, Cina juga sebenarnya sedang berkompetisi dengan Jepang karena sebelumnya di tahun 1998 terdapat *Miyazawa Initiative*, *Obuchi-ASEAN Initiative* dan konsep dibentuknya ASEAN + 3 yang diprakarsai oleh Jepang. Pada awalnya Jepang tidak merasa perlu mengeluarkan kebijakan baru, akan tetapi karena Cina dengan FTA-nya berhasil meliberalisasi pertanian maka Jepang merasa harus mengeluarkan kebijakan baru. Bagi ASEAN sendiri, baik Jepang dan Cina keduanya memiliki arti penting. ASEAN membutuhkan Jepang sebagai sumber kekayaan dan teknologi (*capital and technology*) sedangkan Cina merupakan pangsa pasar yang besar bagi negara-negara ASEAN.

Kekuatan perekonomian Cina yang semakin meningkat di tahun 2001 tidak hanya menjadi perhatian dari Jepang akan tetapi juga dunia. Cina bahkan

¹⁷ Soeya Yoshihide, Japan as A Regional Actor dalam *ASEAN Japan Cooperation, A Foundation for East Asian Community*. Japan Centre for International Exchange, 2003, Hlm. 47.

masuk menjadi salah satu dari empat negara di dunia yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar bahkan mengalahkan Jepang yang tadinya menduduki peringkat kedua setelah Amerika. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbandingannya¹⁸:

Tabel 1.3
A Comparison of Four Major Powers

Country	GDP (US\$ Billions) 2000 (ppp)	Population (Millions) 2000	Foreign Trade Turnover (US\$ Billions) 2000	Defence Expenditures (US\$ Billions) 2000	Defence Expenditures (% of GDP) 2000
USA	9645.9	281.6	2010.2	294.7	3.0
China	5023.2	1262.5	474.3	41.2	3.0
Japan	3317.8	126.9	854.5	44.4	1.0
India	2443.2	1015.9	94.0	14.5	3.1

Source: World Bank, 2001a; World Bank, 2000b; IMF, 2001; IISS, 2001a.

Fase awal hubungan Jepang dengan Asia Tenggara dimulai dengan adanya perbaikan hubungan ekonomi. Hubungan ini dilakukan dengan pemulihan pasca perang dan hubungan perdagangan dimana Jepang menggunakan uang pemulihan hubungan untuk memproduksi barang dan mencari bahan mentah, termasuk minyak, di Asia Tenggara. Baru pada akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an setelah Asia Tenggara menjadi pasar untuk produk Jepang dan menjadi penyuplai bahan mentah, Jepang kemudian mulai berinvestasi di Asia Tenggara dengan memproduksi barang-barang tersebut di level lokal¹⁹.

Terjadinya perang Vietnam telah membuat Amerika Serikat dituntut untuk memberikan perhatian lebih kepada Asia Tenggara. Oleh karena itulah, Amerika Serikat kemudian menuntut Jepang untuk mengambil peran yang lebih besar di Asia Tenggara. Jepang kemudian mengadakan Konferensi untuk Pengembangan Ekonomi di Asia Tenggara (*Conference for Development of Southeast Asia*) di Tokyo pada tahun 1966 dengan tujuan untuk mengusulkan sebuah rencana

¹⁸ Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds). *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*. ISEAS, 2005, Hlm. 182.

¹⁹ Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes and Hugo Dobson, *Japan's International Relations*, Sheffield Centre for Japanese Studies, Routledge Series, Hlm. 212.

pembangunan Asia yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Lyndon Johnson²⁰. Kemudian pada akhir tahun 1960-an, Jepang juga menjadi tuan rumah untuk *Consultative Group of Indonesia* (CGI) dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan yang pro komunis yang dipimpin Soekarno kepada pemerintahan Soeharto.

Pada tahun 1967, ASEAN berdiri sebagai sebuah asosiasi yang merupakan aliansi politik yang dibentuk untuk menjadi benteng melawan penyebaran komunis yang kemudian di akhir tahun 1970-an, Perdana Menteri Ohira mengusulkan dibentuknya *Pacific Economic Community* (PEC)²¹. Usulan ini seiring dengan sedang berkembangnya isu pembentukan masyarakat ekonomi eropa atau *European Economic Community* (EEC). Semua negara di Asia Timur, termasuk negara dengan industri baru seperti Korea Utara, dan anggota ASEAN diharapkan untuk mengikuti langkah yang diambil Jepang sebagai strategi nasionalnya seperti memulai untuk ekspansi industri ringan dan ekspor, sebelum menjadi negara yang merelokasi industri tingkat tinggi.

Berkaitan dengan wacana PEC ini, ASEAN juga terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah Singapura dan Thailand yang menyambut baik usulan ini dan mendukung, sedangkan kubu kedua adalah Indonesia, Malaysia dan Filipina yang menentang dengan alasan kekhawatiran perekonomian mereka akan didominasi oleh Jepang dan Amerika. Indonesia dan Malaysia berfokus pada *non-aligned policy* yang mungkin dapat diterima pada saat itu, akan tetapi pada kenyataannya ide ini kemudian terwujud secara tidak langsung dengan makin terintegrasinya ekonomi dan saling ketergantungan di negara-negara Asia Timur, terutama dalam perdagangan dan industri yang saling melengkapi yang kemudian membuat *Foreign Direct Investment* (FDI) Jepang makin bertambah di wilayah ASEAN maupun di Asia secara umum.

Selama era tahun 1960-an sampai dengan era tahun 1970-an, Jepang juga mulai merumuskan kebijakan *Official Development Aid* atau ODA bagi ASEAN, sekaligus berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai fokus dari ODA Jepang. Jepang juga memberikan bantuan kepada negara-negara di Asia Tenggara karena takut negara-negara ASEAN terkena efek domino dari negara-negara

²⁰ Glenn D, Hlm. 372.

²¹ Glenn D, Hlm. 158.

komunis. Jepang juga didorong oleh Amerika untuk berperan lebih besar di Asia Tenggara karena pada waktu itu Amerika masih mencurahkan perhatiannya kepada Korea.

Jepang berusaha menjalin hubungan dengan Asia Tenggara dengan konsep *'cooperative trinity'* yang terdiri dari perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang diarahkan oleh METI sebagai model ODA Jepang. Kerjasama Jepang dengan Asia Tenggara dilakukan sebagai upaya Jepang menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar bagi produk Jepang dan sumber bahan baku. Asia Tenggara telah berperan dalam pertumbuhan ekonomi Jepang yang berkembang sangat pesat pada masa tersebut. Oleh karena itu, ada istilah yang diberikan pada Jepang yaitu *economic animal* dimana Jepang dianggap sebagai negara yang hanya mengejar keuntungan ekonomi saja, tanpa memperdulikan sosial negara-negara ASEAN.

I. 2 Rumusan Permasalahan

Hadirnya Cina sekitar tahun 2000 tersebut jelas menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang. Cina menawarkan perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN yang meliberalisasi sektor pertanian dimana sektor tersebut adalah sektor yang selama ini dilindungi oleh pemerintah Jepang. Serangkaian penawaran kerjasama ASEAN-Cina tersebut kemudian dicoba ditandingi oleh Jepang dengan penandatanganan *Japan-Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA)* di tahun 2002. Singapura menjadi negara pertama di ASEAN yang menandatangani EPA tersebut karena Singapura tidak memiliki produk pertanian sehingga tidak menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri Jepang²².

Pada tahun 2002 Perdana Menteri Koizumi melalui *Koizumi Doctrine* kemudian menawarkan *ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*. Pada saat ASEAN-Japan Summit di Phnom Pehn pada November 2002, Koizumi menyatakan bahwa Jepang akan menawarkan dua jalur pendekatan dalam kerjasama ekonomi di ASEAN, yaitu melalui ASEAN sebagai lembaga regional dan dengan perjanjian bilateral dengan anggota ASEAN dalam *Economic Partnership Agreement (EPA)*. *Economic Partnership Agreement* dipilih

²² Greg Austin and Stuart Harris, *Japan and Greater China: Political Economy and Military Power in The Asian Century*, London: Hurst and Company, 2001, Hlm. 268.

sebagai bentuk untuk memfasilitasi keberagaman potensi yang dimiliki oleh anggota ASEAN sehingga diharapkan dengan *Economic Partnership Agreement* kerjasama antara Jepang-ASEAN akan memiliki implikasi yang besar terhadap sektor ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, perjanjian ini juga diharapkan lebih menarik bagi negara-negara anggota ASEAN dibandingkan dengan paket yang ditawarkan oleh Cina.

Melalui serangkaian penawaran yang diberikan oleh Perdana Menteri Koizumi di tahun 2002, dan juga dengan dikeluarkannya sebuah kebijakan yakni *Koizumi Doctrine* yang ditujukan untuk negara ASEAN dalam upaya kembali merebut perhatian ASEAN, menunjukkan adanya keinginan Jepang untuk memperbaiki kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN yang dirasa mengalami penurunan akibat bangkitnya negara Cina (*The Rise of China*). Dengan demikian maka apa yang mendasari *Koizumi Doctrine* dan peranan dari *Koizumi Doctrine* di tengah persaingan Jepang-Cina di ASEAN?

I. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa yang terkandung di dalam *Koizumi Doctrine* dan apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya.
2. Mengidentifikasi kepentingan Jepang di Asia Tenggara
3. Mengetahui dinamika persaingan Jepang dan Cina di Asia Tenggara

I. 4 Signifikansi Penelitian

Penulis percaya bahwa tulisan ini akan membantu memahami kepentingan Jepang di Asia Tenggara sehingga memahami kebijakan Jepang di Indonesia.

I. 5 Kerangka Penelitian

Untuk menganalisa munculnya *Koizumi Doctrine* di tahun 2002, penulis akan menggunakan beberapa pola pemikiran yang berhubungan dengan konteks di keluarkannya kebijakan tersebut dalam kaitannya dengan persaingan Jepang-Cina di kawasan regional yakni ASEAN. Diantaranya mengenai konsep perebutan pengaruh, konsep kepentingan nasional dan tujuan dari diplomasi.

I.5.1 Perebutan Pengaruh

Dalam hubungan internasional, banyak analisis percaya bahwa setiap negara memiliki kecenderungan untuk memperbesar *power* yang memiliki arti berupa kekuasaan atau kekuatan. H. J. Morgenthau mendefinisikan politik dalam negeri maupun internasional sebagai upaya perjuangan memperoleh kekuasaan²³. Kautilya, tokoh negarawan India Kuno yang menulis karya besar pada abad 4 SM, menafsirkan *power* sebagai pemilikan kekuatan, yaitu suatu atribut yang terdiri dari pengetahuan, kekuatan (*might*) militer dan keberanian. Dua puluh tiga abad kemudian, Morgenthau memilih mendefinisikan *power* sebagai suatu hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B²⁴.

Salah satu tujuan dari negara adalah memperluas *influence* (pengaruh) dimana *power* dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebuah negara. Di dalam hubungan dua negara, akan terjadi interaksi dimana masing-masing negara akan menggunakan *power* yang dimiliki untuk memperluas *influence* negara tersebut.

Dalam konteks hubungan Jepang-Cina-ASEAN, Jepang dan Cina menggunakan *power* yang mereka miliki untuk memperluas *influence* mereka di Asia Tenggara. Rivalitas antara Jepang dan Cina ini terwujud dalam dinamika hubungan kedua negara dalam merespon kondisi yang ada di Asia Tenggara.

Menilai negara Cina dimata dunia pertama bisa dilihat dari jumlah populasi Cina yang penduduknya mencapai milyaran jiwa yang membuat Cina menjadi negara di dunia dengan populasi terbesar. Cina sendiri bahkan diperkirakan akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar dalam satu atau dua dekade ke depan dan yang saat ini sudah menjadi negara ketiga di dunia dengan kekuatan ekonomi terbesar²⁵. Satu hal yang pasti Cina juga merupakan negara yang sudah memiliki kekuatan nuklir dan menduduki kursi di dalam Dewan Keamanan PBB suatu posisi yang tidak bisa dimiliki oleh Jepang.

²³ Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, 1990, Hlm. 116.

²⁴ Mas'ood, Mohtar, Hlm. 117.

²⁵ Declan Hayes, *Japan the Toothless Tiger: A provocative look at Japan's expanding role in the future of Asia*. Tuttle Publishing, 2001, Hlm. 77.

Baik Jepang maupun Cina sama-sama ingin memberikan peranan dan pengaruh yang besar di ASEAN bahkan di dunia sebagai bentuk *power* yang mereka miliki. Jepang tidak bisa tinggal diam jika melihat negara-negara yang selama ini menjadi partner Jepang dalam hal ini ASEAN tiba-tiba beralih dan diambil oleh Cina. Hal ini menyebabkan Jepang perlu melakukan sesuatu yang baru melalui politik luar negerinya agar negara-negara ASEAN kembali menjadi partner Jepang.

I.5.2 Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Menurut Daniel S. Papp, kepentingan sebuah negara atau kepentingan nasional dengan metode dan aktivitas di dalam mewujudkan kepentingan negara ini disebut kebijakan nasional²⁶. Kepentingan negara Jepang sendiri dapat dilihat melalui kebijakan nasional atau negara yang dikeluarkan oleh Jepang. Beberapa kepentingan nasional juga menurut Papp dapat dilihat dan didefinisikan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Ekonomi, dimana yang menjadi faktor penyebab kebijakan tersebut dibuat adalah untuk meningkatkan perekonomian negara.
2. Ideologi, dimana kebijakan-kebijakan negara tersebut dikeluarkan sesuai dengan ideologi negara dan tujuan dari ideologi negara.
3. Kekuatan militer, dimana kebijakan negara yang dibuat diperuntukan untuk menunjukkan dan mengembangkan kekuatan militer negara tersebut.
4. Kesetaraan (*Morality and Legality*) merupakan faktor yang mendasari dikeluarkannya kebijakan negara.
5. Persamaan Kultur atau Budaya untuk menunjukkan adanya kesamaan kepentingan dan budaya negara tersebut dengan negara lainnya.
6. Etnis dan Ras juga terkadang dapat menjadi faktor dikeluarkan sebuah kebijakan sebuah negara.

Setiap negara memiliki dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Begitu juga

²⁶ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations*. Allyn and Bacon, 1997, Hlm. 43.

dengan Jepang yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu dan diperuntukan untuk kepentingan negara yang nantinya akan berupa sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan yang selama ini bermain di perekonomian dan juga kultur budaya yang banyak dikeluarkan oleh Jepang.

Kebijakan luar negeri sendiri menurut Christopher Hill merupakan kumpulan hubungan-hubungan eksternal suatu negara yang disatukan dan dirumuskan oleh negara tersebut maka dihasilkanlah suatu konsep hubungan internasional²⁷. Selama ini hubungan internasional Jepang dengan negara-negara lain berdasarkan kepentingan untuk meningkatkan perekonomian dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa konsep kerjasama ekonomi yang terangkum dalam *Economic Partnership Agreement* yang beberapa tahun terakhir ditujukan untuk negara-negara ASEAN.

1.5.3 Tujuan dari Diplomasi

Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman²⁸. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Keberhasilan kegiatan diplomasi dapat dinilai dari tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling tukar menukar informasi secara terus menerus dengan negara lain atau rakyat lain di negara lain. Tujuan persuasi antar negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya²⁹.

Jika dikaitkan dengan adanya *Koizumi Doctrine* yang dikeluarkan di tahun 2002, maka akan dilihat bahwa ini merupakan bentuk diplomasi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Koizumi di dalam menunjukkan sikap dan kepentingan dari Jepang. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang merupakan implementasi dari kepentingan negara Jepang terhadap negara-negara lain di dunia dan ASEAN

²⁷ Christopher Hill. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Palgrave Macmillan, 2003, Hlm. 3.

²⁸ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, Hlm. 4

²⁹ Barry Fulton, *Reinventing Diplomacy in the Information Age*, Washington D.C: CSIS, 1998, atau dapat di akses melalui: <http://www.csis.org/ics/dia/>.

khususnya dan hal ini juga merupakan upaya Jepang untuk memperoleh *power* dan memiliki pengaruh di dunia sebagai sebuah negara.

I. 6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka dengan cara penulis akan mengumpulkan data-data *hard copy* maupun *soft copy* berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang relevan dengan *Koizumi Doctrine*.

I. 7 Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan
Berisikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, metodologi penelitian dan kerangka pemikiran.
- BAB II** *Koizumi Doctrine* dalam konteks Kebijakan Luar Negeri Jepang.
Dalam bab ini akan dilihat apa yang terkandung di dalam *Koizumi Doctrine* dan kemunculannya di tengah persaingan Jepang dan Cina
- BAB III** Hubungan Jepang-Cina di kawasan Regional
Dalam bab ini akan dilihat bagaimana gambaran dan dinamika hubungan Jepang dengan Cina termasuk di ASEAN
- BAB IV** Penutup
Dalam bab ini akan diambil kesimpulan mengenai *Koizumi Doctrine* itu sendiri di dalam konteks persaingan Jepang dan Cina.

BAB II

Koizumi Doctrine dalam konteks Kebijakan Luar Negeri Jepang

II. 1 Kebijakan Luar Negeri Jepang Pasca Perang Dunia

Di dalam perkembangannya, negara Jepang juga mengalami perubahan-perubahan kondisi politik, sosial dan ekonomi baik di dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri yang dibuatnya. Apa yang menjadi kepentingan negara Jepang di dalam situasi kondisi tertentu akan terlihat jelas melalui kebijakan yang nantinya di keluarkan dan mencerminkan situasi politik negara. Untuk itu akan dilihat beberapa kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang melalui beberapa Doktrin yang pernah ada.

II.1.1 Yoshida Doctrine

Politik luar negeri Jepang paska Perang Dunia II terhadap Asia pada umumnya dan Asia Tenggara khususnya lebih banyak ditentukan oleh kepentingan ekonomi Jepang. Selama empat puluh tahun pertama sejak bom atom dijatuhkan ke Nagasaki dan Hiroshima, politik luar negeri Jepang ditentukan secara langsung dan tidak langsung oleh pemikiran-pemikiran dasar dari Perdana Menteri Shigeru Yoshida (1946-1954)³⁰.

Kehancuran Jepang paska Perang Dunia II menjadikan urusan pembangunan ekonomi menempati urutan pertama di dalam pemikiran para pengambil keputusan luar negeri Jepang. Sebagai Perdana Menteri pertama paska Perang Dunia II, Yoshida menjadikan perbaikan dan pembangunan ekonomi sebagai sentral dalam menjalankan misi politik luar negeri Jepang. Pengalaman perang melawan sekutu juga membuat Yoshida sangat berhati-hati dalam menetapkan prioritas politik luar negerinya. Sebagai sebuah bentuk kebijakan negara, doktrin ini di tujukan untuk meningkatkan perekonomian negara Jepang, dengan tetap mempertahankan sistem pertahanan dan keamanan Jepang yang tidak diperbolehkan mempunyai militer sesuai dengan undang-undang. Dengan

³⁰ Abdul Irsan, *Politik Domestik, Global dan Regional Jepang*, Hasanudin University Press, 2005, Hlm. 101.

demikian, maka Jepang hanya bisa mengharapkan dapat berperan di dunia melalui perekonomian yang kuat saja. Oleh karena itu, walaupun Amerika mendorong Jepang ikut serta dalam perjanjian keamanan kolektif di Asia sebagian dari strategi Amerika selama Perang Dingin, sebagaimana dilakukan Amerika dalam pembentukan NATO, Yoshida menolak ajakan tersebut karena tidak sejalan dengan tema sentral politik luar negeri Jepang paska Perang Dunia II yang terfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri³¹. Setiap kali Amerika mengajak Jepang untuk terlibat dalam perjanjian keamanan, Yoshida akan kembali ke pasal 9 Konstitusi Jepang yang melarang Jepang menjadikan perang sebagai politik luar negerinya. Bahkan para perdana menteri pengganti Yoshida pun menaati perintah konstitusi Jepang dan tetap fokus pada upaya memperkuat perekonomian Jepang³².

Yoshida juga menolak terlibat dalam perang Korea maupun Vietnam. Berbeda dengan Jerman Barat yang berusaha terlibat dalam perjanjian keamanan NATO, Yoshida tetap menolak dan juga tidak bersedia membayar kerugian peperangan yang diakibatkan Jepang pada masa Perang Dunia II. Bagi Yoshida perang yang dilancarkan Jepang dalam Perang Dunia II adalah kesalahan para pemimpin Jepang di masa lalu sehingga Yoshida menolak untuk bertanggungjawab atas kesalahan tersebut. Sikap keras Yoshida terlibat dalam Perang Dingin di Asia memang membuahkan hasil bagi Jepang karena secara politik Jepang akhirnya memasuki masa stabilitas yang sangat mendukung pembangunan ekonomi dan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang setara dengan perekonomian Barat³³.

Sepanjang tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960-an Jepang mulai mengalirkan bantuan ekonomi ke Asia Tenggara. Di samping upaya Jepang memberikan kompensasi bagi negara-negara yang pernah menjadi jajahannya, Jepang juga ingin menyiapkan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan strategi

³¹ Abdul Irsan, Hlm. 102.

³² Kenneth B. Pyle, Japan's Emerging Strategy in Asia dalam Ellings and Simon (eds), *Southeast Asian Security in the New Millenium*, Hlm. 125.

³³ Kenneth B. Pyle, Hlm. 126-127.

ekspornya. Sebagai contoh, Jepang membantu pembangunan transportasi yang diarahkan untuk membantu Asia Tenggara sekaligus memperlancar aliran masuk barang-barang ekspornya³⁴.

Bagi Jepang, Indonesia, sebagaimana India dan Brasil, adalah negara miskin dengan jumlah penduduk yang melimpah. Karena pada era tahun 1950-an Jepang masih memproduksi barang-barang murah seperti mesin jahit, pakaian, radio dimana Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya merupakan pasar yang bagus bagi industri Jepang saat itu. Sementara Indonesia sebagai negara kaya minyak sudah tentu menjadi incaran utama Jepang yang membutuhkan energi dalam jumlah besar bagi industri-industrinya³⁵. Meningkatnya kebutuhan Jepang akan energi, baik minyak maupun gas alam, membuat hubungan Jepang dan Indonesia semakin kuat. Indonesia menjamin kebutuhan energi Jepang dan otomatis mendapatkan lebih banyak bantuan luar negeri dibanding negara lain di Asia Tenggara.

II.1.2 Fukuda Doctrine

Bantuan-bantuan ekonomi yang diterima negara ASEAN dari Jepang tidak berarti berjalan dengan lancar. Dalam beberapa persepsi publik yang berkembang di Asia Tenggara, terutama di kalangan mahasiswanya, ternyata Jepang juga dianggap sebagai negara penjajah yang hanya mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN saja akan tetapi gagal untuk memberikan ganti yang seimbang bagi ASEAN. Mereka bahkan menuduh para pengusaha Jepang melakukan baik korupsi, kolusi dan juga nepotisme dengan para pejabat lokal sehingga dapat memperoleh proyek apapun yang mereka inginkan³⁶. Kemarahan beberapa mahasiswa ini ditumpahkan saat Perdana Menteri Kakuei Tanaka mengunjungi Jakarta dan Bangkok. Walaupun peristiwa ini mustahil dipisahkan dari dinamika politik di kedua negara bersangkutan, tetapi bagi Jepang demonstrasi anti-Jepang di Jakarta dan Bangkok merupakan isyarat perlunya

³⁴ Ezra F. Vogel, *Japan as Number One in Asia*, dalam Curtis (ed), Hlm. 160.

³⁵ Ezra F. Vogel, Hlm. 162.

³⁶ Narongchai Akrasanee and Aprichat Prasert, *The Evolution of ASEAN-Japan Economic Cooperation*, dalam *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for Internasional Exchange. Tokyo. New York, 2003, Hlm. 68.

melakukan perubahan politik luar negeri untuk mengurangi ketegangan hubungan dengan ASEAN.

Untuk mengatasi dan menghadapi permasalahan ini, dalam kurun waktu tiga tahun, melalui Perdana Menteri Takeo Fukuda, Jepang telah mampu memperbaiki hubungan dengan ASEAN. Fukuda mengeluarkan kebijakan *Heart to Heart Diplomacy* atau yang lebih dikenal sebagai *Fukuda Doctrine*. Suatu cara untuk menyembuhkan luka lama dan berjanji akan memberikan bantuan sebanyak satu juta dolar Amerika³⁷. Walaupun janji ini tidak sepenuhnya dipenuhi, negara-negara ASEAN mulai berpikir untuk mempererat kembali hubungannya dengan Jepang. Negara-negara ASEAN pun memutuskan untuk belajar lebih banyak dari Jepang mengingat kemunduran peran Amerika dari Asia Tenggara yang membuat ASEAN memerlukan pelindung yang baru, terutama dalam bidang ekonomi.

Fukuda berusaha meyakinkan negara-negara ASEAN bahwa Jepang sama sekali tidak ada keinginan untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan militer seperti sebelumnya. Fukuda juga menyatakan bahwa Jepang sudah siap untuk melakukan lebih banyak lagi beragam hubungan perdagangan dengan ASEAN dimana hubungan kerjasama yang terjalin harus dengan posisi yang lebih seimbang baik baik dari Jepang maupun ASEAN³⁸. Setelah itu Fukuda juga mengumumkan beberapa bantuan ekonomi yang cukup besar untuk negara-negara ASEAN.

Setelah adanya *Fukuda Doctrine* ini, didukung dengan pengimplementasiannya yang cepat, maka hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN langsung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak diantara negara-negara ASEAN ini yang tidak hanya menerima *Official Development Aid* (ODA) saja dari Jepang, akan tetapi ditambah juga dengan diberikannya beberapa investasi potensial milik Jepang yang akan meningkatkan perdagangan negara-negara ASEAN tidak hanya dengan Jepang saja tetapi juga dengan negara-negara lain

Singapura adalah contoh negara yang bersemangat untuk belajar banyak dari Jepang. Tidak kurang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew sempat

³⁷ Narongchai Akrasanee, Hlm. 69.

³⁸ Libat tulisan Purnendra Jain, Koizumi's ASEAN Doctrine pada <http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html>.

menyatakan kepada rakyat Singapura bahwa Jepang adalah salah satu guru mereka yang pantas dicontoh. Di dalam kunjungan resmi ke Tokyo tahun 1979, Perdana Menteri Lee juga menyampaikan hal yang sama kepada Perdana Menteri Ohira Masayoshi secara langsung. Lee juga mengajukan usulan agar pemerintah Jepang dapat membantu Singapura mendirikan pusat kajian Jepang di Singapura untuk melahirkan para ahli-ahli Jepang³⁹. Proposal ini memang diharapkan agar semakin banyak investor Jepang yang menanamkan modalnya ke Singapura.

Perdana Menteri Malaysia dengan cepat mengikuti langkah Lee melalui kebijakan “*Look East*” yakni kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi para warga pribumi Malaysia untuk belajar di perguruan-perguruan tinggi Jepang⁴⁰. Bisa dibilang bahwa era tahun 1980-an adalah masa yang paling dekat di dalam hubungan Jepang-ASEAN.

Disamping menekankan aspek ekonomi, politik luar negeri Jepang terhadap negara ASEAN juga menekankan pentingnya memelihara hubungan baik dengan rezim-rezim yang sedang berkuasa sebagai jaminan bagi ekspor Jepang ke kawasan tersebut. Jepang, misalnya, menghindari diri dari keterlibatan dengan urusan politik dalam negeri negara-negara ASEAN. Tidak seperti Amerika yang dengan keras membahas isu-isu pelanggaran HAM di ASEAN, Jepang memilih menutup mulut dan tidak mengganggu urusan dalam negeri di kawasan tersebut. Sudah tentu sikap diam Jepang ini membuat pemerintah-pemerintah di ASEAN lebih suka dengan orientasi politik luar negeri Jepang.

Meningkatnya hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN memasuki tahap baru sejak awal tahun 1980-an. Walaupun investasi Jepang tetap berpusat di Amerika dan Eropa, sejak awal tahun 1980-an Jepang mulai menyebarkan investasinya ke ASEAN. Antara tahun 1985 sampai 1990 tidak kurang dari 241 perusahaan elektronik pun dibangun di ASEAN⁴¹. Sekalipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa investasi besar-besaran yang dilakukan Jepang di ASEAN pada periode ini sesungguhnya merupakan pembangunan jaringan produksi

³⁹ David Chee-Meow Sheah, “ASEAN and Japan’s Southeast Asian Regionalism”, dalam *Japan’s Asian Policy: Revival and Response*, Takashi Inoguchi (Ed), New York: Palgrave Macmillan, 2002, Hlm. 91.

⁴⁰ David Chee-Meow Sheah, Hlm. 92.

⁴¹ Bruce Stokes and Michael Aho, *Asian Regionalism and U.S. Interests*, dalam *The United States, Japan, and Asia: Challenges for U.S. Policy*, Gerald E. Curtis (Ed), Hlm. 126.

offshore. Sehingga sekalipun Jepang menerapkan model industri Jepang, yang di dalamnya perusahaan ini disuplai oleh banyak perusahaan kecil pendukung namun perusahaan pendukung di ASEAN sebenarnya juga dimiliki oleh orang-orang Jepang yang bekerja sama dengan pengusaha lokal⁴². Oleh karena itu, sekalipun ASEAN beruntung menjadi tujuan investasi asing langsung Jepang, akan tetapi di dalam kenyataannya seluruh jaringan bisnis Jepang di ASEAN masih berada dalam genggaman orang-orang Jepang.

Sekalipun demikian, sepanjang tahun 1980-an, Jepang berhasil menampilkan citra yang lebih diterima ASEAN jika dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya⁴³. *Pertama*, pada masa ini Jepang merupakan salah satu sumber investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) dan pengalihan teknologi ke ASEAN. *Kedua*, Jepang memainkan peran penengah yang penting dalam proses penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. *Ketiga*, Jepang juga berperan dalam proses perdamaian knbu Rannarridh dan Hun Sen tahun 1998 dan yang *Keempat*, Jepang banyak membantu upaya rekonstruksi negara-negara Indo-Cina.

II. 2 Kebijakan Luar Negeri Jepang Paska Perang Dingin

Berakhirnya Perang Dingin di tahun 1989 memicu pertumbuhan pemikiran baru tentang hubungan Jepang-Asia. Paska Perang Teluk pertama para pejabat Jepang merasa terhina oleh kritik yang dilancarkan Amerika bahwa Jepang seharusnya tidak sekedar membantu Amerika dengan "*check book diplomacy*"⁴⁴. Jepang merasa bantuan yang berjumlah jutaan dolar sama sekali kurang dihargai oleh pihak Amerika. Perubahan ini menyebabkan popularitas aliansi militer Jepang-Amerika mengalami penurunan yang cukup serius.

Pada tahun 1984, jauh sebelum Perang Teluk Pertama, angka popularitas aliansi tersebut masih bertahan pada posisi 71 akan tetapi pada tahun 1991

⁴² Bruce Stokes and Michael Aho, Hlm. 127.

⁴³ Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes dan Hugo Dobson, *Japan's International Relations*, Sheffield Center for Japanese Studies, Routledge Series, Hlm. 158.

⁴⁴ William W. Grimes, Economic Performance, dalam *US-Japan Relations in a Changing World*, Steven K. Vogel (Ed), Brookings Institution Press Washington D.C, Hlm. 42.

menurun hingga angka 63⁴⁵. Perubahan ini merupakan isyarat bahwa publik Jepang mulai mempertanyakan manfaat dari aliansi militer tersebut persis setelah berakhirnya Perang Dingin. Di samping itu, pemerintah Jepang juga memperhatikan penutupan basis militer Amerika di Philipina dan ratifikasi perjanjian NAFTA oleh Kongres Amerika tahun 1993. Pertikaian perdagangan antara Jepang dan Amerika pada masa Clinton memperkuat rasa tidak puas di kalangan pemerintah Jepang⁴⁶.

Perbedaan persepsi antara Jepang dan Amerika ini dieksploitasi oleh para pemikir di Jepang dengan menyuarakan pandangan pro-Asia mereka. Shintaro Ishihara, mantan anggota Parlemen Jepang dan walikota Tokyo saat itu, menyatakan bahwa Jepang harus mulai meningkatkan tanggungjawabnya untuk mengembangkan kawasan Asia. Ishihara bahkan menulis buku bersama Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad berjudul *The Asia That Can Say No*⁴⁷.

II.2.1 Miyazawa Doctrine

Pada tahun 1993, Kazuo Ogura, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang di Korea juga menyatakan bahwa Jepang dan Asia dapat bekerjasama menciptakan teori Kapitalisme Asia. Seorang ilmuawan sosial terkemuka, Yasusuke Murakami, yang sangat dekat dengan mantan Perdana Menteri Yasuhiro Nakasone juga menyebutkan bahwa Amerika sedang memasuki masa akhir sejarahnya. Menurut Murakami, kebangkrutan tradisi pemikiran Barat ini menjadi jelas sejalan dengan semakin kuatnya tradisi pemikiran Jepang yang tidak sepenuhnya berakar pada pemikiran Barat⁴⁸.

Sementara itu Yoichi Funabashi, seorang penulis beraliran kiri, mendukung pemikiran bahwa Asia dapat menyelesaikan sendiri persoalan mereka. Namun Funabashi juga menyatakan bahwa Jepang tidak harus memisahkan diri dari Eropa dan Amerika⁴⁹. Gelombang pro-Asia dari kalangan

⁴⁵ Christopher B. Johnstone, "Paradigms Lost: Japan's Asia Policy in a Time of Growing Chinese Power", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 21, No. 3, December 1999, Hlm. 373.

⁴⁶ Christopher B. Johnstone, Hlm. 373.

⁴⁷ Christopher B. Johnstone, Hlm. 374.

⁴⁸ Kenneth B. Pyle, Hlm. 141-143.

⁴⁹ Christopher B. Johnstone, Hlm. 374.

intelektual Jepang ini secara tidak langsung mendorong pemerintah Jepang untuk mulai memperhatikan nasib dan masa depan Asia.

Dukungan pemerintah Jepang terhadap masa depan hubungan Jepang-Asia mulai terlihat lewat pernyataan Menteri Luar Negeri Taro Nakayama dalam pertemuan *ASEAN Post Ministerial Conference* (PMC) di Kuala Lumpur tahun 1991, bahwa isu-isu keamanan perlu dijadikan bahan pembicaraan dalam pertemuan *Post Ministerial Conference* (PMC). Pada mulanya isyarat ini tidak sepenuhnya mendapat tanggapan serius dari para peserta pertemuan, namun dalam pertemuan *Post Ministerial Conference* (PMC) berikutnya di Manila isu-isu keamanan mulai menjadi bahan pembicaraan. Untuk mempertahankan momen ini, dalam sebuah pidato di Bangkok pada tahun 1993 Perdana Menteri Kiichi Miyazawa mengajak ASEAN untuk membangun dialog keamanan dalam rangka yang lebih formal. Kemudian konsep ini terwujud di tahun 1994 dalam pertemuan pertama *Asean Regional Forum* (ARF) dimana isu-isu keamanan benar-benar menjadi bahasan penting oleh anggota ASEAN dan mitra dialog⁵⁰.

Dengan adanya *Asean Regional Forum* (ARF) ini maka diharapkan konsentrasi yang telah dibentuk akan dapat membangun kawasan ASEAN menjadi lebih baik dan maju di dalam menghadapi persoalan-persoalan regional termasuk permasalahan keamanan yang menjadi agenda utama di bentuknya ARF. Munculnya kekuatan-kekuatan militer yang diciptakan baik oleh Cina maupun Korea dan juga negara lain membuat negara Jepang secara tidak langsung mengalami kekhawatiran mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Jepang untuk tidak mengembangkan militernya. Hal ini juga kembali merunut kepada *Article 9* yang menjadi acuan dasar kemiliteran Jepang. Ini juga menjadi salah satu tujuan diplomasi Jepang untuk bisa mendekati dan tetap menjadi partner bagi negara-negara ASEAN supaya Jepang juga tetap memiliki *power* sekalipun tidak berbentuk kekuatan militer. Berikut adalah data-data yang diambil dari Japan's Diplomatic BlueBook 2006 mengenai ARF⁵¹:

⁵⁰ Christopher B. Johnstone, Hlm. 374.

⁵¹ Lihat pada Japan's Diplomatic BlueBook 2006 yang diakses pada www.mofa.go.jp.

Gambar II.1

ASEAN Regional Forum (ARF)

1. Goals and Characteristics

- The ARF was established in 1994 as a forum for region-wide dialogue concerning political and security-related matters in the Asia-Pacific region. ASEAN is the primary driving force of the ARF.
- The ARF aims to improve the regional security environment through dialogue and cooperation on political and security-related issues. Both defense and military officials as well as foreign policy officials attend the meetings.
- The ARF is a continuum of meetings centering on ministerial meetings (foreign-minister level), which are held every summer.
- The ARF places emphasis on free exchanges of views and consensus as its basic principle.
- The ARF aims to achieve gradual progress through an approach based on three stages: (1) the promotion of confidence building, (2) the development of preventive diplomacy, and (3) the improvement of approaches to conflict resolution.

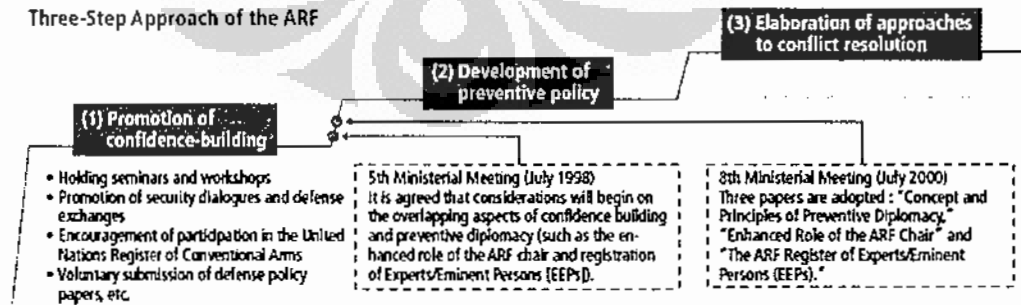
2. Participating Countries and Organization

- The 25 members include 10 ASEAN countries (Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, Laos, Viet Nam, Cambodia, and Myanmar), Japan, Australia, Canada, China, India, North Korea, the ROK, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Russia, Timor-Leste, and the US, as well as the European Union (the EU countries do not participate individually but are instead represented by the country holding the EU presidency and the European Commission.)

3. Past Developments

- **July 1991: ASEAN Post-Ministerial Meeting (ASEAN-PMC)**
Then-Minister for Foreign Affairs Taro Nakayama proposes to use the occasion of the PMC to initiate political dialogue and suggests the establishment of a Senior Officials Meeting as an effective approach (the Nakayama proposal).
- **July 1993: ASEAN-PMC**
It is agreed that five countries including China and Russia will be invited to participate in the ARF from 1994 onwards.
- **July 1994: 1st ARF Ministerial Meeting (held in Thailand)**
The meeting in Thailand is attended by foreign ministers from 18 ARF participating countries and one organization, who exchange views on the regional security environment.
- **August 1995: 2nd ARF Ministerial Meeting (held in Brunei)**
As a medium-term approach for the ARF, an agreement is achieved to make gradual advancements following the three stages of: (1) the promotion of confidence building; (2) the development of preventive diplomacy; and (3) the elaboration of approach for resolving conflicts; and to focus on confidence building for the time being.
- **July 2000: 8th ARF Ministerial Meeting (held in Vietnam)**
On the topic of preventive diplomacy, the following three papers are adopted: Concept and Principles of Preventive Diplomacy, Enhanced Role of ARF Chair, and ARF Register of Experts/Eminent Persons.
- **July 2002: 9th ARF Ministerial Meeting (held in Brunei)**
 - It is confirmed that continued efforts will be put forth toward counter-terrorism. Also the establishment of the inter-sessional meeting on counter-terrorism is approved.
 - Nine proposals are adopted including increasing the participation of relevant defense and military officials, and strengthening support for the ARF chair through the ASEAN Secretariat.
 - Prior to the Ministerial Meeting, a meeting of ARF defense and military officials is held for the first time.
- **July 2004: 11th ARF Ministerial Meeting (held in Indonesia)**
A decision is made to hold the ARF Security Policy Conference (ASPC) by high-level military and government officials. (The first conference is held in China in November 2004, and the second conference is held in Laos in May 2005.)
- **July 2005: 12th ARF Ministerial Meeting (held in Laos)**
The terrorist incidents in London and Sharm el-Sheikh (Egypt) are condemned, and the importance for the international community to unify its efforts to tackle counter-terrorism measures is acknowledged.

Three-Step Approach of the ARF



Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

Walaupun kecenderungan untuk mendekati Asia mulai terlihat, Jepang menunjukkan rasa takut terhadap sekutu utamanya yakni Amerika, sehingga tetap menjaga kehati-hatian dalam setiap langkah mendekati Asia. Jepang, misalnya, menolak usulan Mahathir Muhammad tentang *East Asia Economic Caucus* (EAEC) yang meniadakan Amerika di dalamnya. Jepang juga tetap berkeras agar APEC melibatkan Amerika di dalamnya, walaupun Australia, pemrakarsa APEC, berusaha untuk tidak melibatkan Amerika⁵².

Sekalipun demikian, perjalanan menuju Asia bukan persoalan sederhana bagi Jepang. Serangkaian peristiwa di Asia Timur mendorong Jepang untuk tidak tergesa-gesa merangkul Asia karena realitas yang tidak sebagaimana diharapkan. Sebagai contoh di bulan Mei tahun 1993 Pyongyang melakukan uji peluru kendali Balistik yang dapat menghancurkan kota-kota utama di seluruh Jepang. Kemudian di tahun 1996 Cina juga melakukan uji peluru kendali di Teluk Taiwan yang akhirnya kembali mengingatkan Jepang tentang kompleksitas Asia yang sedemikian nyata⁵³.

Oposisi Cina terhadap peningkatan pengaruh Jepang memuncak saat Jepang mengusulkan pembentukan *Asian Monetary Fund* (AMF) yang di dalamnya Jepang menyediakan dana sebesar 100 juta dolar Amerika. Bukan hanya Amerika yang menentang pembentukan dari *Asian Monetary Fund* (AMF), Cina pun menolak usulan tersebut sebagai reaksi ketidaksukaan Cina terhadap langkah Jepang meningkatkan pengaruhnya di Asia⁵⁴. Perkembangan ini membuat Jepang lebih berhati-hati di dalam mendukung perkembangan regional dan multilateral yang sedang dikembangkan ASEAN lewat *Asean Regional Forum* (ARF) maupun ASEAN + 3. Jepang dituntut untuk memperhatikan kepentingan Cina yang tidak mungkin diabaikan begitu saja sebagai kekuatan penyeimbang baru di Asia.

⁵² Christopher B. Johnstone, Hlm. 375.

⁵³ Takashi Inoguchi, "Japan Goes Regional", *Japan's Asian Policy: Revival and Response*, Takashi Inoguchi (Ed), New York: Palgrave Macmillan, 2002, hal. 16.

⁵⁴ Christopher B. Johnstone, Hlm. 377.

II. 3 Kebijakan Luar Negeri Jepang Pasca Krisis Asia

Berakhirnya Perang Dingin dan munculnya kekuatan Cina (*the rise of China*) telah menghadapkan Jepang kepada tuntutan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan baru di dalam diplomasi internasional dan regionalnya. Kemajuan negara Cina untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, baik dalam kerangka bilateral maupun dalam kerangka regional (ASEAN), merupakan tantangan serius bagi posisi internasional Jepang sebagai salah satu mitra terpenting bagi negara-negara ASEAN.

Tepat di tahun 1997, negara-negara ASEAN mengalami permasalahan ekonomi yang cukup serius yakni krisis ekonomi di Asia. Negara Jepang yang menjadi negara panutan saat itu diharapkan dapat menjadi penolong yang mampu membantu menyelesaikan masalah di dalam pemulihan perekonomian negara-negara ASEAN ini. Jepang sendiri ketika itu sedang tidak lagi menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar karena Jepang sedang mengalami penurunan di dalam pertumbuhannya beberapa tahun terakhir. Tingkat pengangguran di Jepang pun meningkat 5.5 % sejak berakhirnya Perang Dunia II⁵⁵. Perusahaan-perusahaan di Jepang sendiri juga sedang mengalami penurunan kinerja bahkan cenderung mengalami stagnasi dimana institusi-institusi keuangannya sedang menghadapi kemuduran akibat beban pinjaman yang telah mereka keluarkan sebelumnya⁵⁶.

Seiring dengan adanya perubahan-perubahan situasi keamanan dan juga politik, dirasa perlu adanya sebuah doktrin baru seperti *Koizumi Doctrine* yang dinilai akan lebih tepat untuk mewakili kebijakan luar negeri Jepang. Sebuah strategi kebijakan negara yang baru yang menginginkan adanya (a) peningkatan kekuatan negara secara struktural, (b) mempertahankan stabilitas negara, dan (c) mempertahankan nilai persaingan ekonomi Jepang di dunia⁵⁷. Tahun 2002 sendiri merupakan tahun yang cukup signifikan bagi hubungan diplomatik Jepang dengan Asia. Hal ini disebabkan karena pada tahun ini, menandakan peringatan 30 tahun normalisasi hubungan Jepang dengan Cina; 50 tahun peringatan penandatanganan

⁵⁵http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-1593638/Koizumi-calls-for-closer-economic.html

⁵⁶http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-1593638/Koizumi-calls-for-closer-economic.html

⁵⁷Lihat tulisan Purnendra Jain, *Koizumi's ASEAN Doctrine* pada <http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html>

perjanjian perdamaian Jepang dengan India dan juga 25 tahun peringatan *Fukuda Doctrine* yang ketika itu dinyatakan di Manila oleh Perdana Menteri Takeo Fukuda di tahun 1977⁵⁸.

Jika dilihat berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas maka kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan oleh Jepang memang banyak mencakup wilayah perekonomian karena Jepang tetap ingin menjadi negara yang memiliki kekuatan yang besar dalam hal ini ekonomi. Hal ini juga perlu diingat karena Jepang sendiri tidak memiliki kekuatan militer yang bisa dikembangkan sehingga Jepang menempuh cara lain untuk tetap memiliki *power* di dunia melalui ekonomi. Jika sebelumnya dilihat baik melalui *Yoshida Doctrine* yang menginginkan Jepang untuk tidak menggunakan kekuatan militernya melainkan dengan memajukan perekonomian negara untuk menjadi negara yang besar, begitu juga dengan *Fukuda Doctrine* yang menekankan pentingnya tercipta hubungan yang baik dengan negara-negara ASEAN sebagai partner dalam perdagangan, maka sama halnya dengan *Miyazawa Doctrine* yang ingin adanya hubungan yang lebih dekat dengan ASEAN melalui suatu wadah yang bisa menjadi mitra dialog dengan negara-negara ASEAN.

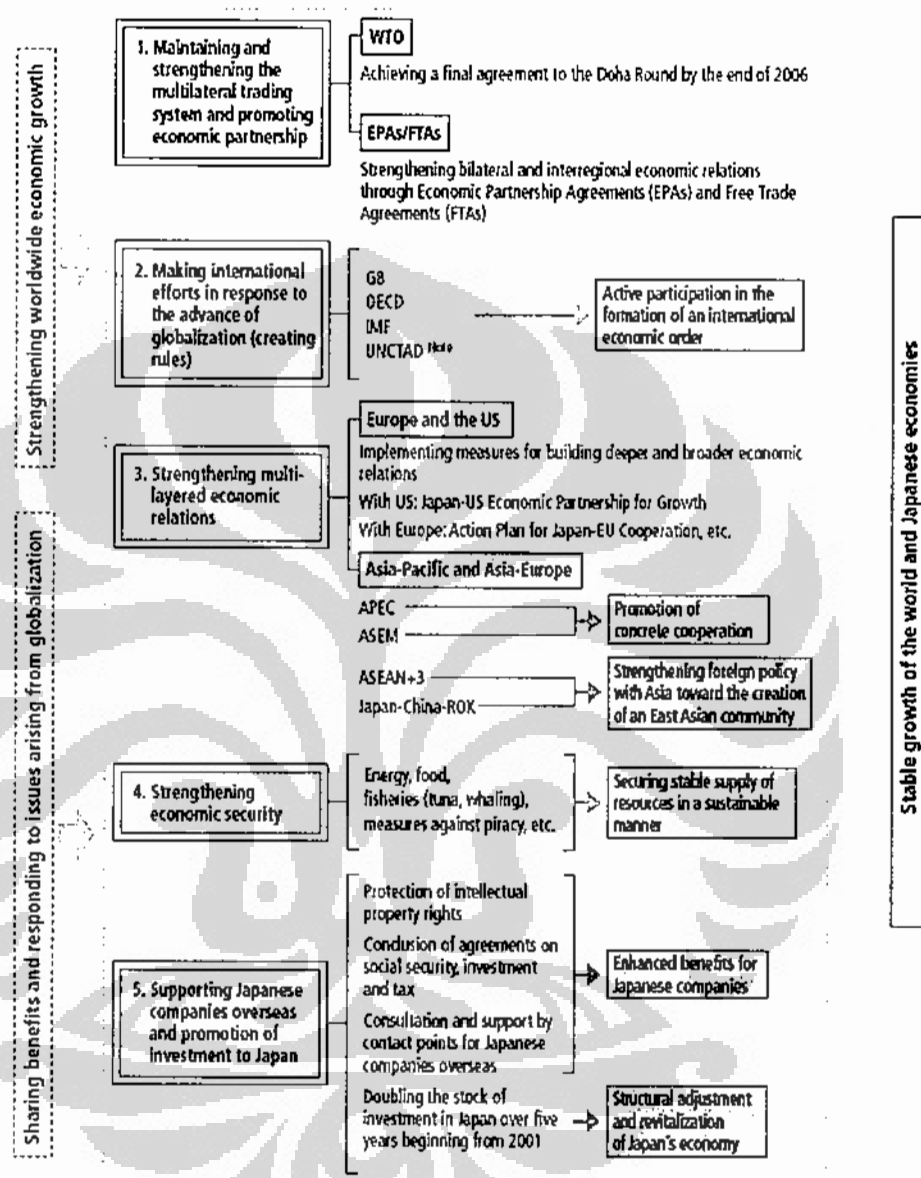
Jepang sangat konsisten dengan upayanya menjaga hubungan-hubungan dengan negara-negara lain melalui hubungan diplomasi di bidang ekonomi dan teknologi. Jepang juga terus mengeluarkan kebijakan luar negeri yang fokus di bidang ekonomi maupun ilmu dan teknologi karena hanya melalui kekuatan bidang ini, Jepang dapat berkembang dan akhirnya memiliki *power* di dunia karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jepang tidak bisa mengembangkan kekuatan militernya akibat undang-undang dasar yang dimiliki oleh Jepang dan tidak dapat dirubah. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan ekonomi luar negeri yang dimiliki oleh Jepang sebagaimana yang ditulis di dalam *Japan's Diplomatic BlueBook 2006* sebagai berikut⁵⁹:

⁵⁸ Lihat tulisan Purnendra Jain, Koizumi's ASEAN Doctrine pada <http://www.atimes.com/japan-econ/DA10Dh01.html>

⁵⁹ Lihat pada www.mofa.go.jp.

Gambar II.2

Theme of Japan's Economic Foreign Policy



Note: United Nations Conference on Trade and Development

Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

II.3.1. Koizumi Doctrine

Pada tanggal 14 Januari 2002, di tengah kunjungannya ke ASEAN, Perdana Menteri Koizumi mengeluarkan pernyataan berjudul "*Japan and the ASEAN in the East Asia – A Sincere and Open Partnership*", yang kemudian dikenal sebagai "*Koizumi Doctrine*". Sebagaimana ditulis di *East Asian Strategic Review 2003*, yang menjadi isi dari Doktrin ini adalah:

"...the Koizumi doctrine stressed the ideal of "acting together and advancing together" as candid partners, and proposed the following points of cooperation: (1) undertaking reforms and increasing prosperity; (2) strengthening cooperation for the sake of stability; and (3) cooperation related to the future. Under "cooperation related to the future", he listed: (1) education and human resources development; (2) designation of 2003 as the "Year of Japan-ASEAN Exchange", (3) the "Initiative for Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership"; (4) a proposal to convene an "Initiative for Development in East Asia" meeting; and (5) intensification of Japan and ASEAN security cooperation including "transnational issues"..." (P. 211)

Doktrin ini menekankan pentingnya tentang aksi bersama dan maju bersama sebagai rekanan, dengan menekankan poin-poin kerjasama berikut ini: (1) menjalankan pembaharuan dan meningkatkan kemakmuran; (2) memperkuat kerjasama untuk memelihara stabilitas di kawasan; (3) merancang kerjasama untuk masa depan yang terdiri dari beberapa aspek berikut: (a) pendidikan dan pengembangan SDM; (b) menjadikan tahun 2003 sebagai "*Year of ASEAN-Japan Exchange*"; (c) perencanaan insiatif Kemitraan Ekonomi Jepang-ASEAN; (d) membuat sebuah proposal untuk meluncurkan "*an Initiative for Development in East Asia*"; (e) adanya intensifikasi kerjasama keamanan Jepang ASEAN, termasuk dalam isu-isu transnasional⁶⁰.

Kebijakan ini juga mengingatkan kepada *Fukuda Doctrine* di tahun 1977 yang berisi empat hal penting yaitu (1) janji Jepang untuk tidak menjadi negara *superpower* dalam militer, (2) pemhentuan kerjasama saling percaya antara Jepang dan negara Asia Tenggara, (3) kerjasama dengan ASEAN, dan (4) membantu memperkuat rasa percaya diri negara – negara ASEAN. Secara

⁶⁰*East Asian Strategic Review 2003*, The National Institute for Defense Studies, Japan, Tokyo: Japan Times, 2003.

spesifik, memperkuat rasa percaya diri tersebut dengan membentuk komunitas regional. Jika dibandingkan, *Fukuda Doctrine* ini dikeluarkan karena ketika itu di tahun 1970-an pasca Perang Dunia II akibat terdapatnya pemikiran “anti Jepang”. Maka dengan adanya *Fukuda Doctrine*, diharapkan agar hubungan Jepang dan ASEAN bisa menjadi lebih dekat. Sebagai hasil nyata dari kebijakan ini seperti yang telah disebutkan diatas, Lee Kuan Yew kemudian memproklamkan kebijakan “*Look Japan*” di Singapura sedangkan Mahatir Muhammad dengan kebijakan “*Look East*” -nya, dimana keduanya berusaha untuk mempelajari rahasia kesuksesan ekonomi Jepang untuk Singapura dan Malaysia.

Dikeluarkannya *Koizumi Doctrine* di tahun 2002 yang kembali menekankan pentingnya ASEAN bagi Jepang dinilai sebagai suatu respon instan Jepang terhadap langkah Cina yang memelopori *China-ASEAN Free Trade Area* (CAFTA) sebelumnya yang dibuat pada November 2001⁶¹. Doktrin ini menegaskan pula bahwa dalam hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, Jepang akan melibatkan aspek budaya yang lebih mendalam, dengan mengambil istilah *heart to heart relations*. Dalam *Koizumi Doctrine* juga ditekankan tentang gagasan untuk mengintensifikan kerjasama ekonomi Jepang-ASEAN, yang diwujudkan melalui adanya inisiatif Jepang untuk memulai negosiasi menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Jepang-ASEAN. Jepang melakukan negoisasi EPA, dengan tetap menghindari komitmen liberalisasi di sektor pertanian⁶².

Dengan nama *Koizumi Doctrine*, Perdana Menteri Koizumi memberikan pernyataan mengenai kebijakan baru hubungan Jepang-ASEAN di Singapura. Peristiwa ini juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ryutaro Hashimoto yang di dalam kunjungan terakhirnya di ASEAN pada bulan Januari 1997, dimana Hashimoto sempat menyebutkan beberapa hubungan bilateral dan multilateral yang akan dibangun untuk memperkuat diplomasi Jepang baik dalam bidang ekonomi dan budaya dengan negara-negara ASEAN

⁶¹ Syamsul Hadi, *Checkbook Diplomacy* Jepang dalam hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia dalam *Jurnal Hukum Internasional* Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁶² *East Asian Strategic Review 2003*, Hlm. 211. Karena merupakan salah satu dukungan utama Partai Demokrasi Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, petani mendapatkan perlakuan politik khusus, termasuk melalui proteksi di sektor pertanian terhadap produk-produk pertanian yang hendak masuk ke Jepang.

yang juga diberi nama *Hashimoto Doctrine*⁶³. Jika *Fukuda Doctrine* telah membuat perubahan besar di dalam sejarah hubungan Jepang dan ASEAN, lain halnya dengan *Hashimoto Doctrine* yang hanya diketahui sedikit saja di kalangan para diplomat dan akademisi.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa melalui pidatonya di Singapura, Perdana Menteri Koizumi telah mempersiapkan suatu konsep dan bentuk hubungan diplomasi Jepang terhadap kawasan ASEAN. Koizumi menyatakan bahwa Jepang dan ASEAN harus memperkuat hubungan mereka dengan slogan *acting together and advancing together as sincere and open partners*⁶⁴.

Pidato yang diberi judul *Japan and ASEAN in East Asia* ini juga mengingikan ke depan akan adanya kerjasama *Japan-ASEAN comprehensive economic partnership (JCEP)* yang di dalam hubungan kerjasama ini akan lebih beragam, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan maupun pariwisata, seperti halnya perdagangan dan investasi yang selama ini sudah terjalin. Perdana Menteri Koizumi juga mengajukan sebuah pertemuan yang akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dapat membantu mengembangkan kawasan ASEAN termasuk masalah bantuan dana dan strategi untuk kawasan.

Perdana Menteri Koizumi telah menandatangani sebuah perjanjian bilateral (FTA) dengan Singapura di tanggal 13 Januari 2002, sebuah konsep perjanjian bilateral pertama bagi Jepang. Menurutnya, pola ini dapat menjadi model dan bentuk kerjasama yang tepat untuk diterapkan di negara-negara ASEAN. Sebagai respon dari penandatanganan FTA dengan Singapura ini, akhirnya bermunculan permintaan-permintaan untuk disepakatinya FTA bilateral yang lain yang telah diajukan oleh negara-negara ASEAN lainnya. Respon yang pertama datang melalui kunjungan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang meminta Jepang agar mau menandatangani FTA dengan Thailand⁶⁵. Jepang sendiri tampaknya tidak begitu tertarik dengan tawaran ini, akan tetapi dengan hadirnya hubungan baru antara Cina dan ASEAN, yang sebelumnya telah

⁶³ Aurelia George Mulgan, *Japan's Failed Revolution: Koizumi and the Politics of Economic Reform*, Asia Pacific Press, 2002. Hlm. 58.

⁶⁴ Lihat tulisan A 'Koizumi doctrine' for Asia pada <http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/ed20020116a1.html>

⁶⁵ Lihat pada http://www.jcie.org/researchpdfs/ASEAN/asean_jawhar.pdf

menyepakati untuk melakukan FTA selama 10 tahun ke depan, Jepang akhirnya harus memikirkan dengan serius FTA-FTA yang akan dibuat dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk sekedar mencegah agar perkembangan ekonomi Cina tidak berpengaruh di ASEAN yang selama ini berada di dalam pengaruh Jepang.

Untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan negara-negara di ASEAN, Jepang menciptakan suatu pola hubungan kerjasama yang baru. Melalui *Koizumi Doctrine* dan beberapa perjanjian ekonomi yang dihasilkannya sebagai implikasi dan implementasi doktrin tersebut, Jepang berharap negara-negara di ASEAN akan tertarik kembali untuk melakukan kerjasama dengan Jepang. Berdasarkan Teori Angsa Terbang (*The Flying Geese*) di percayai bahwa terdapat satu negara yang dianggap sebagai pemimpin di depan negara-negara lainnya, dimana dalam hal ini Jepang yang memimpin perekonomian negara-negara ASEAN pasca PD II. Suatu kedudukan yang pernah diraih oleh Jepang dan oleh sebab itu dengan masuknya Cina di ASEAN maka tidak mungkin akan ada dua negara yang berperan sebagai pemimpin. Memang bisa dilihat bahwa sebelum Restorasi Meiji, Cina sempat berada di depan Jepang yang akhirnya disusul Jepang setelah PD II walaupun tanpa menggunakan kekuatan militer. Akan tetapi mulai sejak tahun 2000 ketika Cina mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka Jepang dan Cina sedang berada di posisi depan dan oleh sebab itu rivalitas antara mereka pun semakin terlihat jelas.

BAB III

Hubungan Jepang-Cina di ASEAN

Ada tiga hal yang menyebabkan pihak Jepang menganggap Cina sebagai ancaman terhadap keamanannya⁶⁶: *Pertama* adalah masalah Nasionalisme Cina yang sering menunjukkan sikap yang dianggap berlebihan mengakibatkan reaksi yang cenderung menilai Cina bersikap agresif dalam melaksanakan hubungannya dengan negara di kawasan Asia Timur, terutama terhadap mereka yang dianggap menentang kepentingan politiknya di Selat Cina Selatan dan di Taiwan. *Kedua*, Cina telah berhasil mengembangkan persenjataan canggih yang mampu mengimbangi persenjataan pertahanan Jepang dan sudah mengembangkan mesin perang untuk tindakan *offensive*. *Ketiga* adalah kemajuan ekonomi dan industri yang dicapai Cina yang menyebabkan terjadinya persaingan dengan Jepang untuk mendapatkan suplai energi.

Sementara itu, Cina menganggap persekutuan Jepang-AS sebagai suatu bentuk alat politik yang sengaja digunakan untuk mengganggu tujuan politik Cina menyatukan Taiwan, sebagai bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri. Jepang juga cenderung melaksanakan kebijakan politik yang tegas menghadapi sikap Cina di Laut Cina sebagai suatu bentuk sikap politik menghadapi apa yang disebut sebagai "ancaman Cina" yang sudah disebutkan sebelumnya diatas.

Cina selalu merasa khawatir dengan kemajuan teknologi militer Jepang karena tiga hal⁶⁷: *pertama*, kemampuan dan kemajuan teknologi yang dimiliki Jepang, akan dengan mudah digunakan membangun mesin perang, termasuk mengembangkan senjata nuklir; *kedua*, pembangunan mesin perang Jepang, antara lain bertujuan untuk menghalangi setiap ambisi Cina membangun kekuatan maritim, karena Cina sangat yakin bahwa Jepang juga sedang membangun kekuatan angkatan laut dan angkatan udara; *ketiga*, Jepang diperkirakan sedang mempersiapkan kekuatan akan mampu mengimbangi kemampuan militer Cina tanpa bantuan AS, terutama pada saat AS mulai mengurangi perannya di kawasan Asia Timur.

⁶⁶ Abdul Irsan, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007, Hlm. 183.

⁶⁷ Abdul Irsan, Hlm. 183.

Berdasarkan persaingan Jepang-Cina diatas, dilihat bahwa terdapat suatu sikap reaksi yang diambil masing-masing negara sebagai suatu bentuk respon atas apa yang telah dilakukan oleh salah satu negara sebelumnya dalam hal ini Jepang atau Cina terlebih dahulu. Jepang tidak mau kalah bergerak dengan Cina, begitu pun sebaliknya. Jika dikaitkan dengan adanya *Koizumi Doctrine* yang dikeluarkan di tahun 2002 paska dibuatnya FTA dengan negara ASEAN oleh Cina di tahun 2001 sebelumnya maka dapat dilihat bahwa ada keterkaitan diantara peristiwa tersebut.

III.1 Hubungan Jepang dengan ASEAN

Hubungan Jepang dengan Asia Tenggara dimulai ketika Jepang bermaksud mendapatkan sumber energi dan hasil alam. Didudukinya Asia Tenggara adalah ketika terjadinya Perang Dunia II atau Perang Pasifik yang pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Perang Minyak yang dilancarkan Jepang untuk mendapatkan sumber energi bagi kepentingan industri dan ekonominya, akibat terjadinya embargo minyak yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1941⁶⁸.

Setelah berakhirnya Perang Pasifik, hubungan dengan Asia Tenggara pun berkembang menjadi hubungan ekonomi dan perdagangan yang dilandasi oleh kepentingan negara masing-masing Jepang dan Asia Tenggara. Dalam mendapatkan suplai energi dari Timur Tengah, Jepang juga sangat berkepentingan dengan kondisi keamanan dan stabilitas wilayah laut di lingkungan Asia Tenggara yang merupakan jalur laut vital untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan, serta suplai energi bagi industrinya⁶⁹.

Dibandingkan dengan bangsa-bangsa Barat (Belanda, Perancis, Spanyol, Portugis, dan Amerika) Jepang belum terlalu lama menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan kawasan di mana negara-negara inti ASEAN berada. Sekalipun demikian, Jepang adalah satu-satunya negara yang pernah menjajah negara-negara Asia Tenggara walaupun hanya bertahan kurang dari empat tahun. Oleh karena itu, sekalipun dalam ingatan bangsa-bangsa Asia

⁶⁸ Takashi Inouguchi, *Japan's Foreign Policy in an era of Global Change*, Printer Publisher Ltd, London, 1993, Hlm. 96.

⁶⁹ Takashi Inouguchi, Hlm. 96.

Tenggara Jepang adalah negara penjajah, akan tetapi Jepang gagal menanamkan pengaruh budayanya di kawasan Asia Tenggara⁷⁰.

Asia Tenggara di masa kekaisaran Jepang sebelum kalah dalam peperangan melawan sekutu adalah kawasan selatan⁷¹. Dalam ingatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, Jepang merupakan salah satu dari negara yang pernah menjajah selain bangsa-bangsa Eropa yang telah lebih dahulu menjajah negara-negara di kawasan ini. Sedangkan negara Thailand merupakan pengecualian dan menjadi satu-satunya negara yang beruntung terbebas dari penjajahan Barat maupun Jepang.

Perilaku yang dinilai kejam dari bangsa Jepang di masa Perang Dunia II tidak hanya dirasakan dan diingat oleh sebagian negara-negara Asia Tenggara, akan tetapi juga masih membayangi ingatan masa lalu dari bangsa Cina dan Korea Selatan. Oleh karena itu, setiap kali Perdana Menteri Jepang mengunjungi kuil Yasukuni, yang merupakan monumen pahlawan perang Jepang, selalu saja menimbulkan kontroversi dari Cina dan Korea hingga saat ini. Reaksi semacam ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Jepang masih belum bisa “dimaafkan” atas sejarah yang telah menimpa negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang.

Secara umum politik luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dapat dilihat berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa doktrin yang disebutkan sebelumnya pada BAB II, yakni *Yoshida Doctrine*, *Fukuda Doctrine* dan *Miyazawa Doctrine*⁷². Melalui ketiga doktrin inilah yang menjadi salah satu penentu dan yang membentuk pola hubungan Jepang dan Asia Tenggara sebelumnya. Perbedaan ketiganya mengalami perubahan sejalan dengan perubahan konteks regional dan internasional yang melingkupi dinamika politik luar negeri Jepang satu-satunya⁷³. Hal ini juga dilanjutkan melalui adanya *Koizumi Doctrine* yang juga kembali mengangkat hubungan yang baik sebagai mitra perekonomian dengan negara-negara ASEAN.

⁷⁰ Charles E. Morrison, “Southeast Asia and U.S.-Japan Relations”, dalam *The United States, Japan and Asia: Challenges for U.S Policy*, Gerald E. Curtis (Ed), New York: W.W.Nortoo & Company, 1994, Hlm. 145.

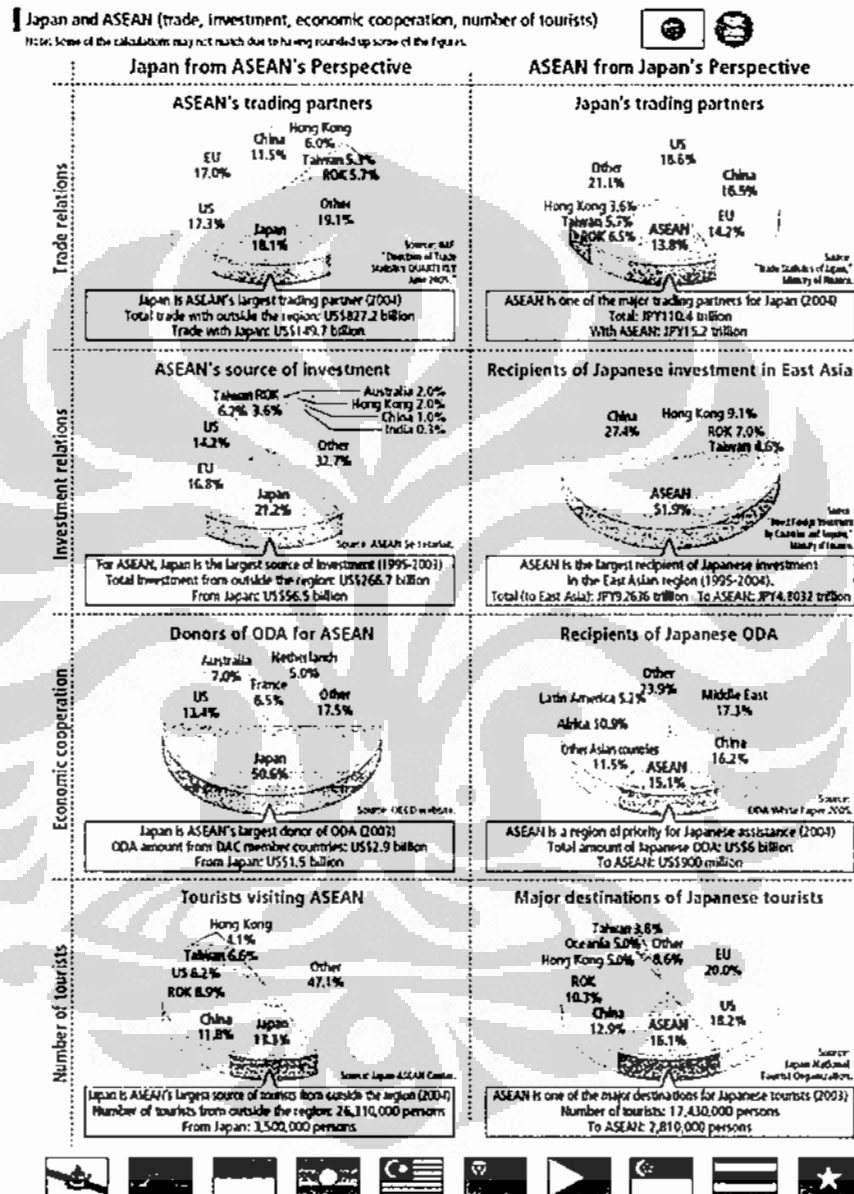
⁷¹ Charles E. Morrison, Hlm. 145.

⁷² Charles E. Morrison, Hlm. 145.

⁷³ Dennis D. Trinidad, “Japan’s ODA at The Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s Development to Southeast Asia”, dalam *Asian Perspective*, Vol. 31, No. 2, 2007, Hlm. 107.

Berikut beberapa data yang diambil dari Japan's Diplomatic BlueBook 2006 yang menggambarkan hubungan Jepang dengan ASEAN⁷⁴:

Gambar III.1



Source: Japan's Diplomatic Bluebook 2006

Berdasarkan gambar diatas, hubungan Jepang dengan ASEAN sendiri tidak dapat dipisahkan dengan adanya bantuan Jepang dalam bentuk *Official Development Aid (ODA)* yang sempat meningkat jumlahnya sejak tahun 1985

⁷⁴ Lihat pada www.mofa.go.jp.

akan tetapi mengalami penurunan sejak 1995 seperti yang terlihat pada tabel dibawah⁷⁵:

Tabel III.1
Distribusi Regional ODA Jepang
(dalam Juta dollar AS)

Wilayah	1985	1990	1995	1998	2000	2002	2004
Asia	1732	4117	5745	5327	5284	4085	2544
ASEAN	800 (46 %)	2299 (56 %)	2229 (39 %)	2356 (44 %)	3129 (58 %)	1748 (43 %)	897 (35 %)
Timur Tengah	201	705	721	392	727	209	1031
Afrika	252	792	1333	950	969	585	647
Amerika Latin	225	561	1142	553	800	592	309
Oceania	24	114	160	147	151	94	42
Eropa	1	158	153	144	118	121	141
Total	2557	6941	10557	8606	9640	6726	5954

Sumber: Statistical Handbook of Japan, 2002; Diplomatic Book, 2004.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 1990 lebih dari separuh *Official Development Aid* (ODA) Jepang didistribusikan di Asia, yang hampir separuhnya terdistribusi ke negara-negara ASEAN yang kemudian mengalami penurunan sejak tahun 2000. Kemudian pada tahun 2004 perbedaan antara *Official Development Aid* (ODA) yang dialokasikan ke ASEAN dan Afrika juga mengecil dan tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, seperti yang dicatat oleh Trinidad (2007), hal ini sama sekali tidak berarti bahwa ASEAN sudah tidak lagi penting atau berkurang signifikansinya bagi negara Jepang⁷⁶. Sebaliknya, seperti yang dinyatakan di dalam *Japanese Diplomatic Bluebook 2004*, mempertahankan hubungan Jepang-ASEAN tetap menjadi hal penting untuk kebijakan luar negeri Jepang⁷⁷. Tujuan utama dari negara Jepang kepada

⁷⁵ Syamsul Hadi, Checkbook Diplomacy Jepang dalam hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁷⁶ Dennis D. Trinidad, Hlm. 108.

⁷⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, Diplomatic Book 2004, dalam www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/index.html, Hlm. 54.

ASEAN tetap tidak berubah, akan tetapi *Official Development Aid* (ODA) Jepang ke ASEAN akan lebih diarahkan kepada usaha mengurangi kesenjangan antara negara-negara lama ASEAN (ASEAN 6) dengan negara-negara yang baru belakangan menjadi anggota ASEAN (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam)⁷⁸. Hal ini juga ternyata berkaitan dengan upaya untuk mengkonsolidasikan lebih lanjut integrasi ASEAN dan meningkatkan stabilitas regional⁷⁹.

Pada saat terjadi ketegangan yang berkelanjutan dalam hubungan Jepang-Cina, nilai *Official Development Aid* (ODA) Jepang ke Cina justru terus meningkat, dari 760 juta dollar AS di tahun 2003 menjadi 965 juta dollar AS di tahun 2004 dan 1.064 juta dollar AS di tahun 2005⁸⁰. Berdasarkan *Japan External Trade Organization* (JETRO), investasi negara Jepang ke Cina ternyata mengalami sebuah peningkatan di tahun 2001 sampai dengan 2005, yakni 14 persen dari investasi Jepang ke luar negeri⁸¹. Kemudian pada tahun 2004, nilai dari investasi Jepang ke Cina mencapai 5 milyar dollar AS, sementara nilai investasi Jepang di ASEAN hanya mencapai 3 milyar dollar AS⁸².

Jepang juga tetap melakukan perdagangan yakni hubungan perekonomian dengan Amerika Serikat dan juga Cina untuk membangun kekuatan ekonominya di dunia. Hubungan perdagangan ini juga semakin meningkat pada tingkat ekspor baik ke Amerika Serikat maupun ke Cina. Sebaliknya untuk impor, Jepang justru mengalami peningkatan impor dari Cina sejak sempat menurun di tahun 1998 dan kemudian meningkat. Sedangkan untuk impor dari Amerika Serikat mengalami penurunan sejak tahun 2000-an. Hal ini dapat dilihat melalui data yang terdapat dalam data gambar dibawah yang diambil dari JETRO trade 2003 berikut:

⁷⁸Syamsul Hadi, Checkbook Diplomacy Jepang dalam hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁷⁹Ministry of Foreign Affairs of Japan, Diplomatic Book 2004, Hlm. 54.

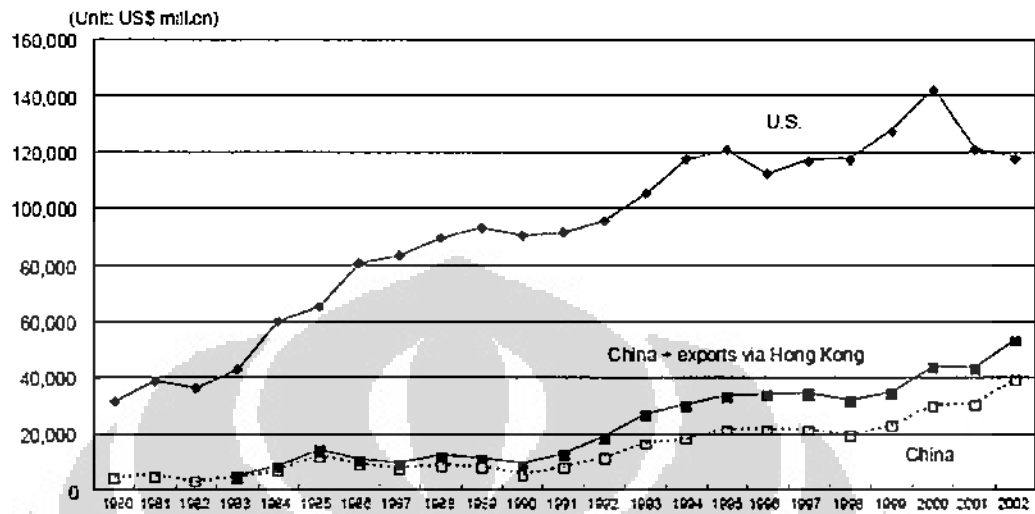
⁸⁰Syamsul Hadi, Checkbook Diplomacy Jepang dalam hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

⁸¹"Japan's Investment in China Changing", dalam People's Daily Online, 6 Februari 2007.

⁸²"ASEAN to be focus for Japan Investors", dalam The Nation, 26 November 2005.

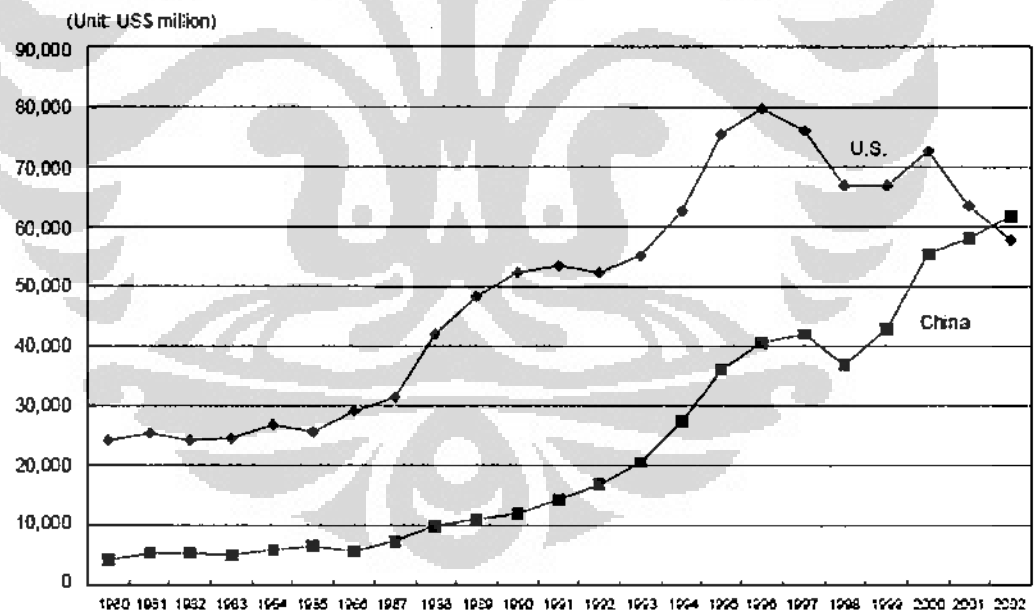
Gambar III.2

Fig. 2-2 (1) Japanese exports to U.S. and China



Note: China + exports via Hong Kong = Japanese exports to China + exports from Japan destined for China via Hong Kong
 Source: Prepared by JETRO from trade statistics.

Fig. 2-2 (2) Japanese Imports from U.S. and China



Source: Prepared by JETRO from trade statistics.

III. 2 Hubungan Cina dengan ASEAN

Hubungan Cina dan ASEAN pada awalnya ditandai dengan kecurigaan satu sama lain. Cina menganggap kehadiran ASEAN dalam politik regional di tahun 1960-an sebagai bentuk lain dari ancaman Barat terhadap komunis Cina.

Sebagian anggota ASEAN memang merupakan anggota dari organisasi keamanan regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh Amerika dan Inggris (*Collective Defense Treaty, SEATO, Five Power Defense Arrangement*). Sementara itu, negara-negara ASEAN juga mencurigai Cina sebagai induk dari gerakan komunis di Asia Tenggara.

Banyaknya Cina perantauan yang sukses di negara-negara ASEAN juga menambah daftar kecurigaan ASEAN terhadap Cina atas kemungkinan gerakan politik orang-orang Cina perantauan tersebut. Tidak mengherankan jika ideologi dan agama menjadi penghalang hubungan ASEAN dan Cina pada awalnya⁸³. Hingga memasuki era tahun 1970-an Cina menarik perhatian negara-negara ASEAN sebagai model yang dapat ditiru, walaupun barang-barang produk Cina sudah memasuki pasar Asia Tenggara sebelumnya.

Titik perubahan hubungan ASEAN-Cina dimulai setelah Deng Xiaoping melancarkan reformasi politik ekonominya. Sejak akhir tahun 1970-an Deng membuat Cina mulai terbuka dengan dunia luar dan mulai membuka pintu bagi investasi asing. Kunjungan Presiden Nixon ke Beijing tahun 1972 sesungguhnya sudah merupakan isyarat bakal terjadinya perubahan politik luar negeri Cina. Penarikan pasukan Amerika dari Vietnam tahun 1975 menandai perubahan perimbangan kekuasaan di Asia. ASEAN sesungguhnya mengkhawatirkan ancaman Cina sepeninggal Amerika yang mulai meninggalkan ASEAN sejak kejatuhan Saigon. Sampai dengan tahun 1990-an hanya beberapa negara ASEAN lain menjalin hubungan dagang dengan Cina melalui negara ketiga, Hong Kong.

Sejak akhir tahun 1970-an Cina juga mulai mendekati ASEAN dengan mengurangi dukungan terhadap gerakan komunis di negara-negara ASEAN. Upaya pertama dilakukan dengan menutup Radio Rakyat Thailand di propinsi Yunan tahun 1979. Kebijakan ini telah mengurangi pengaruh Cina terhadap gerakan komunis di Thailand. Tahun 1983 Cina kembali menutup siaran radio komunis *Suara Demokrasi Malaya*⁸⁴. Penutupan ini merupakan langkah-langkah awal yang diambil Cina untuk membuka hubungan dengan ASEAN dan sekaligus

⁸³ Reuben Mondejar and Wai Lung Chu, ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions, dalam Ho Khai Leong and Samuel C.Y.Ku (Eds), *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, Singapura: ISEAS, 2005, Hlm.217.

⁸⁴ N. Ganesan, ASEAN's Relations with Major External Powers, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.22, Issue 2, August 2000, Hlm.8.

mengimbangi kehadiran Uni Soviet yang mendukung invasi Vietnam ke Kamboja.

Kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Thailand pada tahun 1988 menandai babak baru hubungan Cina dengan ASEAN. Dalam kunjungan ini Li Peng menjelaskan kebijakan dasar Cina terhadap ASEAN berupa upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan hubungan hubungan Cina dengan ASEAN. Tahun berikutnya secara resmi Cina membubarkan Partai Komunis Malaysia dan Partai Komunis Thailand di sebuah wilayah di Thailand. Manuver ini memperkuat keyakinan ASEAN bahwa Cina memang benar-benar serius dalam upayanya mendekati ASEAN. Indonesia juga menanggapi kebijakan Cina ini dengan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Cina pada bulan Agustus tahun 1990 dan diikuti Singapura di bulan November tahun 1990.

Pada bulan Juli tahun 1991 Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen menghadiri pembukaan *Asean Ministerial Meeting* yang ke-24. Cina memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan niatnya bekerjasama dengan ASEAN yang ditanggapi positif oleh ASEAN dengan memberikan status Mitra Konsultasi kepada Cina. Terobosan ini dimanfaatkan Cina untuk segera meningkatkan hubungan dengan ASEAN yang akhirnya pada Juli tahun 1996 Cina akhirnya mendapatkan status penuh sebagai Mitra Dialog⁸⁵.

Walaupun ASEAN bersedia menerima Cina sebagai Mitra Dialog bukan berarti bahwa tidak terdapat masalah di dalam hubungan tersebut. Indonesia dikenal sangat sulit menjalin kembali hubungan dengan Cina karena alasan etnis dan kudeta komunis di Indonesia pada tahun 1965 (G/30/S/PKI). Sementara itu bagi Vietnam, yang sempat medapat serangan dalam bentuk agresi Cina ke Vietnam di tahun 1979 tetap menganggap Cina sebagai ancaman potensial. Persepsi negatif ini juga diperumit oleh pendudukan Cina atas Kepulauan Sparty di tahun 1988.

Konflik Cina-Philipina atas kepulauan *Mischief Reef* juga menambah kuat gelombang anti-Cinaisme sejak akhir pertengahan tahun 1990-an. Sekalipun demikian, karena alasan etnis, Malaysia dan Singapura tidak sekuat negara

⁸⁵Saw Swee-Hock, Sheng Lijin and Chin Kin Wah, "An Overview of ASEAN-Cina Relations", dalam Saw Swee-Hock, Sheng Lijin, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, Hlm.1-2.

ASEAN lain dalam menanggapi agresivitas Cina dalam kaitan dengan klaim perbatasan wilayah. Myanmar bahkan memiliki hubungan khusus dengan Cina. Hubungan perdagangan dan akses Cina ke kawasan pantai dan lepas pantai di teluk Bengal membuat Myanmar lebih dekat dengan Cina dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN yang lain⁸⁶.

Akan tetapi, ASEAN tetap konsisten untuk mengembangkan kerjasamanya dengan Cina dengan mempertimbangkan posisi strategis dan potensi pasarnya yang sedemikian besar. Tahun 1994 Cina diterima di ASEAN dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF). Perkembangan ini membuka peluang bagi kedua pihak untuk membicarakan isu-isu keamanan secara kelembagaan dan bersifat langsung. Cina juga mulai terlibat dalam pertemuan ASEAN + 3 pada tahun 1997, pertemuan ini sangat penting bagi Cina karena mempercepat pendekatan dengan ASEAN yang sangat diharapkan. Pertemuan puncak ASEAN-Cina akhirnya berlangsung dalam Pertemuan Puncak ASEAN tahun 2003. Dalam pertemuan ini kedua belah pihak menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi ASEAN-Cina. Kesepakatan ini merupakan persiharapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Cina yang diharapkan terealisasi dalam waktu 10 tahun⁸⁷.

III. 2.1 Kebangkitan Cina

Kebangkitan Cina dalam bidang ekonomi dan persenjataan sepanjang tahun 1990-an menimbulkan berbagai macam tanggapan di kalangan ASEAN. Itulah sebabnya, sekalipun pada awal tahun 1990-an Indonesia dan Singapura membuka kembali hubungan diplomasi dengan Cina, mereka juga dengan cepat membuka pintu kerjasama dengan Amerika dalam bentuk penyediaan basis militer terbatas.

Sekalipun demikian, sikap ASEAN ini tidak menghentikan langkah Cina untuk tetap bergerak ke selatan untuk mendapatkan lebih banyak teman. Upaya mendekati ASEAN ini didasarkan pada pertimbangan yang cukup baik. Sesudah berakhirnya Perang Dingin, dengan memperhatikan kondisi regional Cina tampaknya berjalan mantap sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan politik wakil presiden Hu Jianto dalam sebuah pertemuan di Indonesia yang

⁸⁶ N. Ganesan, Hlm.18.

⁸⁷ Mondejar and Chu, Hlm.218.

diselenggarakan oleh *Indonesia Council of World Affairs*. Dalam pertemuan tersebut Hu Jianto menyatakan bahwa konsep keamanan Cina menekankan persamaan, dialog, dan kerjasama untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Untuk itu diperlukan rasa hormat satu sama lain, kerjasama timbal-balik, konsensus dan kerjasama yang menghindari pemaksaan kehendak seseorang pada orang lain⁸⁸.

Sebagai realisasi dari konsep baru kebijakan luar Cina terhadap ASEAN di atas Cina menjadikan dekade akhir abad ke-20 sebagai dekade “pembinaan hubungan baik” dengan ASEAN. Sepanjang periode ini Cina banyak menandatangani dokumen bilateral maupun kolektif dengan ASEAN.

Disamping itu, Cina juga meningkatkan hubungan dagang dengan ASEAN. Di antara negara ASEAN, Singapura merupakan rekanan dagang terbesar diikuti oleh Indonesia, Malaysia, dan Philipina. Sesudah krisis keuangan Asia, Cina mulai meningkatkan investasinya ke ASEAN⁸⁹. Hubungan dagang Cina-ASEAN ini ditingkatkan dalam bentuk perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* tahun 2001.

Dalam tahun berikutnya disepakati bahwa perdagangan daging, produk ikan, dan tumbuh-tumbuhan akan dibebaskan mulai tahun 2004. Sementara tarif dan produk lain akan dihapuskan secara bertahap hingga terealisasinya FTA tahun 2015⁹⁰. Cina sendiri terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak tahun 1999 sampai dengan 2004 seperti yang terlihat melalui data dibawah ini yang diambil dari JETRO trade 2003⁹¹:

⁸⁸ Chulacheeb Chinwanno, “The Dragon, The Bull and The Ricetalks: The Role of China and India in Southeast Asia, dalam Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, Hlm.154.

⁸⁹ Chinwanno, Hlm. 156.

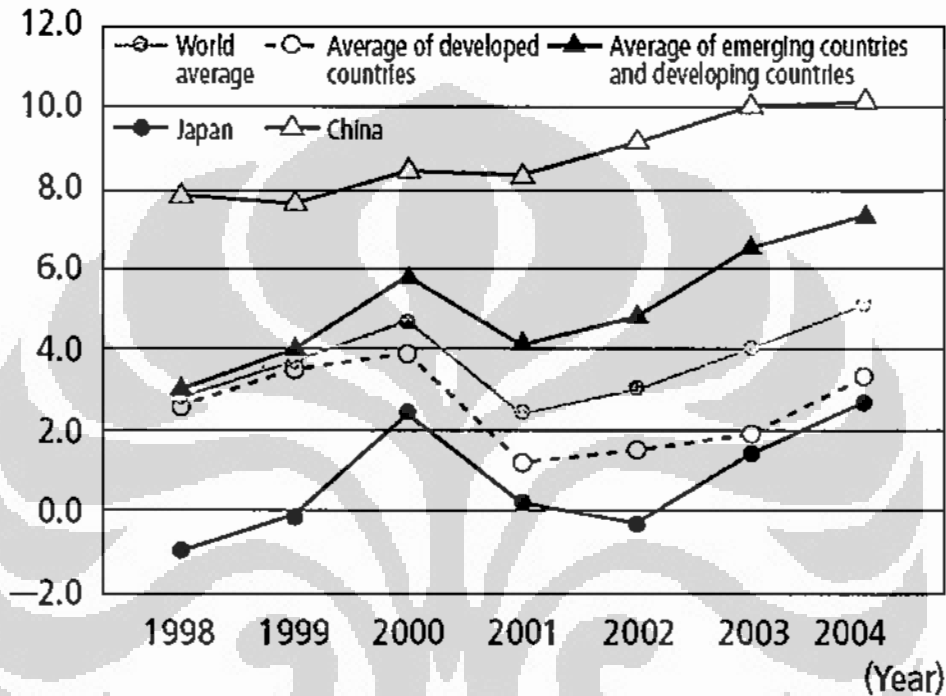
⁹⁰ Chinwanno, Hlm. 157.

⁹¹ Lihat pada JETRO Trade 2003.

Gambar III.3

China's Economic Growth

GDP growth rate
(%)



Source: International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook (WEO) September 2005, National Bureau of Statistics of China.

Pergantian kepemimpinan Cina dari generasi ketiga ke generasi keempat pada tahun 2003 ditandai munculnya Hu Jintao sebagai Sekretaris Jendral Partai Komunis Cina menggantikan Jiang Zemin. Peralihan tongkat kepemimpinan ini juga berlangsung di tingkat perdana menteri yang disini adalah Wen Jiabao menggantikan Zhu Rongji sebagai Perdana Menteri Cina dimana pergantian ini tidak mengurangi niat Cina untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN.

Sementara itu bagi ASEAN, Cina adalah pasar raksasa bagi produk yang dihasilkan ASEAN. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, Cina juga bisa berupa ancaman jika dilihat dari meningkatnya kekuatan militer Cina dalam lima belas tahun terakhir yang tidak mungkin diimbangi oleh ASEAN. Oleh karena itu, sekalipun ASEAN bersemangat untuk meningkatkan hubungan dagang dengan

Cina akan tetapi senantiasa selalu waspada terhadap tujuan Cina sebenarnya. Untuk memperkuat kewaspadaan tersebut ASEAN juga membuka pintu kerjasama militer dengan Amerika. Cina menyadari sepenuhnya sikap ganda ASEAN ini mengingat besarnya pengaruh ekonomi dan militer Cina baik di tingkat regional maupun global.

Untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari kemajuan ekonomi Cina tanpa harus menyinggung perasaan Cina yang sadar akan waspada ASEAN, maka ASEAN melancarkan politik luar negeri yang mampu menjaga keseimbangan dengan Cina, Amerika, dan Jepang. Menurut Chien Peng Chung, ASEAN menerapkan strategi “tidak memihak” atau *fence straddling or hedging* dalam menghadapi persoalan-persoalan genting dalam hubungan ASEAN-Cina⁹². Berikut adalah beberapa faktor permasalahan yang perlu dilihat diantara hubungan ASEAN dengan Cina:

Konflik Spratly Island. Konflik yang berkembang antara Cina dan negara-negara ASEAN lebih banyak melibatkan Philipina dan Vietnam. Kedua negara ini terlibat konflik dengan Cina karena Cina dengan sengaja menampakkan diri dalam perairan atau kawasan di sekitar *Spartly Island* yang diklaim oleh Philipina maupun Vietnam. Sementara itu, konflik Cina-Vietnam telah berlangsung sejak Cina menyebut invasinya ke Vietnam tahun 1979 sebagai “pelajaran” yang diberikannya kepada Vietnam. Brunei, Indonesia, dan Malaysia memilih perluasan kerjasama ekonomi daripada mempersoalkan klaim wilayah masing-masing negara dengan Cina. Akan tetapi pada saat yang sama Malaysia dan Indonesia memberi tempat bagi militer Amerika berupa fasilitas terbatas bagi transportasi udara dan laut Amerika.

Sebaliknya, Cina memandang konflik di *Spartly Islands* bukan sebagai halangan untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN. Sekalipun Cina setuju untuk membicarakan konflik kawasan tersebut dalam konteks ASEAN dan menentang campur tangan negara non-ASEAN untuk ikut campur dalam urusan tersebut, Cina justru menekankan pentingnya membangun kawasan tersebut.⁹³ Walaupun ajakan Cina ini tidak mudah diwujudkan karena klaim-klaim atas

⁹² Chien Peng Chun, *Southeast Asia-China Relations: Dialectics of ‘Hedging and Counter Hedging* dalam *Southeast Asian Affairs* 2004, Singapura: ISEAS, 2004, Hlm. 37.

⁹³ Chung, Hlm. 40.

kawasan tersebut hingga kini tidak sepenuhnya terselesaikan. Kawasan *Spartly Islands* tampaknya akan tetap menjadi batu sandungan bagi hubungan Cina-ASEAN sebagaimana posisi Amerika yang akan tetap membayangi potensi perluasan pengaruh Cina di kawasan ASEAN.

Hubungan Cina-Taiwan. Hubungan Cina-Taiwan yang fluktuatif menuntut sikap fleksibel dari ASEAN. Sikap resmi ASEAN terhadap hubungan kedua negara tersebut adalah hanya mengakui satu Cina. Dalam pandangan ASEAN konflik kedua negara adalah urusan dalam negeri mereka, oleh karena itu ASEAN tidak akan ikut campur di dalamnya. Sekalipun demikian, bukan berarti ASEAN mengabaikan keberadaan Taiwan. Kepentingan ekonomi ASEAN mendorongnya untuk tetap memelihara hubungan dengan Taiwan sejauh tidak menimbulkan kritik dari Cina daratan yang cenderung peka terhadap isu-isu hubungan Cina-Taiwan.

ASEAN cenderung menjaga stabilitas hubungan kedua negara untuk mencegah munculnya perang antara Cina dan Taiwan. Provokasi terhadap stabilitas hubungan saat ini akan memicu pecahnya perang Cina-Taiwan yang pada akhirnya mengundang keterlibatan Amerika di dalamnya. Perang Cina versus Amerika akan mengguncang ekonomi-politik ASEAN yang sudah tentu akan sangat merugikan masa depan ASEAN sebagaimana krisis finansial tahun 1997. Di samping itu, instabilitas di selat Taiwan dengan sendirinya juga akan merusak keamanan jalur minyak di Laut Cina Selatan yang dilewati kapal-kapal tanker minyak pensuplai kebutuhan energi Jepang. Ancaman terhadap perekonomian Jepang pada akhirnya juga akan merugikan ASEAN.

Faktor Amerika dan Jepang. Sebagaimana telah dinyatakan di depan bahwa kedekatan ASEAN dengan Amerika adalah upaya ASEAN untuk membatasi peluang perluasan pengaruh Cina di ASEAN. Cina menyadari sikap ASEAN dan mengkritik kerjasama militer Amerika dengan negara-negara ASEAN. Cina mempersoalkan latihan militer Amerika-Philipina (*Balikatan*), Amerika-Thailand (*Golden Cobra*), kehadiran tentara Amerika di Philipina untuk membantu tentara Philipina menghadapi Abu Sayyaf⁹⁴. Keterlibatan Jepang dalam kampanye anti-teror yang dicanangkan oleh Amerika meningkatkan aktifitas

⁹⁴ Chung, Hlm. 43.

militer Jepang sebagaimana tercermin pada keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang (*Japan Self-Defence Force*) dalam operasi militer Amerika di Iraq, sekalipun tidak berada di garis depan. Perkembangan ini juga meningkatkan kekhawatiran Cina.

Regionalisme Ekonomi. Seiring dengan semakin meningkatnya hubungan Cina-ASEAN, hubungan ekonomi Cina-ASEAN pun terus berkembang. Hubungan Cina dan ASEAN sebelum krisis ekonomi yang melanda ASEAN tahun 1997 telah mulai meluas pada forum ASEAN + 3 dan *Cina-ASEAN Free Trade Area (CAFTA)*. Sesudah krisis ekonomi, Cina justru meningkatkan keterlibatannya dalam perekonomian ASEAN melalui pemberian bantuan bagi ASEAN lewat IMF maupun pemberian langsung ke Thailand. Akhir tahun 2002 Cina menghapus hutang-hutang Pnomh Penh. Krisis *Special Administrative Region* yakni mengenai daerah otonom khusus Cina di tahun 2003 ternyata tidak mengurangi pertumbuhan perdagangan Cina-ASEAN. Sementara ASEAN merupakan kawasan menarik bagi para turis asal Cina. Lebih dari dua juta turis Cina mengunjungi negara-negara ASEAN sepanjang tahun 2000⁹⁵.

Sekalipun demikian perlu digarisbawahi bahwa peningkatan kerjasama ini sudah tentu diharapkan Cina akan mampu menciptakan dukungan negara-negara ASEAN terhadap kasus *Spartly Islands*, Taiwan, dan mendorong lebih banyak investasi ASEAN ke Cina daratan. Cina juga berharap, kedekatan Cina dengan ASEAN mampu mengimbangi peran Amerika dan Jepang di Asia Tenggara⁹⁶.

ASEAN mulai membahas *China-ASEAN Free Trade Agreement* sejak tahun 2000 dan secara bertahap mulai tahun 2000 hingga tahun 2003 dilakukan berbagai pembahasan yang disepakati bahwa nanti pada tahun 2015 *China-ASEAN Free Trade Area* akan dimulai.

Ada dua alasan yang mendukung upaya Cina melakukan langkah ini, yakni, alasan politik dan ekonomi. Secara politik Cina berharap melalui peningkatan hubungan ekonomi, maka kekhawatiran ASEAN terhadap kebangkitan ekonomi dan militer akan dapat berkurang. Di samping itu, melalui kerjasama ekonomi dengan ASEAN diharapkan Cina akan dapat mengimbangi kemajuan Amerika dan Jepang di Asia Tenggara.

⁹⁵ Chung, Hlm. 49.

⁹⁶ Chung, Hlm. 50.

Secara ekonomi, Cina berharap kerjasama ini akan mempermudah jalan bagi Cina untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dari kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, ASEAN juga berharap kerjasama ini akan membuka jalan bagi ASEAN menjual lebih banyak produknya ke Cina dan mendorong Cina untuk melakukan investasi langsung ke Asia Tenggara⁹⁷.

Kesediaan Cina membuka kesempatan untuk mengembangkan *Free Trade Area* dengan ASEAN akhirnya memberikan motivasi untuk Jepang mengeluarkan kebijakan baru. Pada tahun 2002 Perdana Menteri Jepang Koizumi mengusulkan perjanjian kemitraan ekonomi dengan ASEAN. Jepang tampaknya tidak ingin tertinggal di belakang Cina yang telah lebih dahulu membicarakan rencana pengembangan *Free Trade Area* dengan ASEAN.

III.3 Hubungan Jepang-Cina di ASEAN

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi ASEAN saat ini adalah kebangkitan ekonomi Cina dan India. Kedua negara ini dikenal semakin memainkan peran strategis dalam perekonomian global. Hubungan ekonomi ASEAN-Cina mengalami perubahan-perubahan cukup menonjol sejak tahun 2003. Di satu sisi, ekspor ASEAN ke Cina terus meningkat dan baik untuk ASEAN. Akan tetapi, pada waktu yang sama ekspor ASEAN ke pasar Amerika justru terus menurun saat ekspor Cina ke Amerika justru meningkat. Kenaikan impor Cina ke Amerika merupakan perubahan pertanda bahwa Cina dalam proses menggantikan pasar barang jadi ASEAN di Amerika, yang ditandai dengan berkurangnya ekspor barang jadi ASEAN ke Amerika. ASEAN yang semula pemasok barang jadi ke Amerika sekarang hanya mampu memasok bahan mentah ke Cina yang akan diproduksi menjadi barang jadi untuk diekspor ke Amerika⁹⁸. Di samping itu, arus investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Cina antara 2001 hingga 2003 jauh melebihi arus *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke ASEAN. Dalam kenyataan, banyak investor yang memindahkan pabrik mereka dari ASEAN ke Cina⁹⁹.

⁹⁷ Pangestu, Hlm. 211.

⁹⁸ Manu Bhaskaran, "Economic Impact of China and India on Southeast Asia," *Southeast Asian Affairs* 2005, Singapura: ISEAS, 2005, Hlm. 63-66.

⁹⁹ Bhaskaran, Hlm. 69.

Tabel III.3
Indeks Kepercayaan Investasi Asing Langsung

Negara	Rangking 2002	Rangking 2003	Rangking 2004
Cina	1	1	1
India	15	6	3
Hong Kong	18	22	8
Malaysia	-	23	15
Singapura	22	28	18
Thailand	20	16	20
Indonesia	-	25	23
Korea Selatan	21	18	21
Taiwan	24	20	25

Sumber: Diolah dari Manu Bhaskaran, "Economic Impact of China and India", hal. 71.

Menghadapi tantangan baru di atas negara-negara ASEAN bereaksi sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Tidak semua negara ASEAN mampu menanggapi dengan cepat kemajuan Cina dan India dalam bidang ekonomi. Namun beberapa negara dengan cepat telah melakukan penyesuaian diri, bahkan Singapura telah melakukannya sebelum krisis ekonomi menghantam ASEAN.

Sekalipun demikian, Cina juga masih mendapatkan bantuan dari Jepang yakni *Official Development Aid* (ODA). Ini memberikan indikator bahwa Jepang dan Cina sendiri memang memiliki hubungan kerjasama yang juga baik di bidang perekonomian. Jumlah ODA yang diberikan Jepang juga cukup besar sekalipun jumlah itu juga terus menurun dan berkurang setelah tahun 2002 seperti yang ditulis pada Japan's Diplomatic BlueBook 2006 sebagai berikut¹⁰⁰:

¹⁰⁰ Lihat pada www.mofa.go.jp.

Gambar III. 5

Record of Japan's ODA to China

(Unit: 100 million yen)

FY	Loan aid ^a	Grant aid ^a	Technical ^a cooperation	Total
1980	660.00 ^b	6.80	5.64 ^b	672.44
1981	1,000.00	23.70	10.18	1,033.88
1982	650.00	65.80	19.78	735.58
1983	690.00	78.31	30.45	798.76
1984	715.00	54.93	26.77	796.70
1985	751.00	58.96	39.48	849.44
1986	806.00	69.68	48.10	923.78
1987	850.00	70.29	61.92	982.21
1988	1,615.21	79.58	61.49	1,756.28
1989	971.79	56.98	40.51	1,069.28
1990	1,225.24	66.06	70.49	1,361.79
1991	1,296.07	66.52	68.55	1,431.14
1992	1,373.28	82.37	75.27	1,530.92
1993	1,387.43	98.23	76.51	1,562.17
1994	1,403.42	77.99	79.57	1,560.98
1995	1,414.29	4.81	73.74	1,492.84
1996	1,705.11	20.67	98.90	1,824.68
1997	2,029.06	68.86	103.82	2,201.74
1998	2,065.83	76.05	98.13	2,240.01
1999	1,926.37	59.10	73.14	2,058.61
2000	2,143.99	47.80	81.97	2,273.76
2001	1,613.66	63.33	77.77	1,754.76
2002	1,212.14	67.88	62.37	1,342.39
2003	966.92	51.50	61.80	1,080.22
2004	858.75	41.10	59.23	959.08
Total^c	31,330.56	1,457.31	1,505.58	34,293.45

^a Figures for loan aid (yen loans) and grant aid are based on exchanges of notes. Figures for technical cooperation are based on actual disbursements by JICA (not including technical cooperation and the acceptance of foreign students carried out by other government ministries and agencies).

^b Figures for FY1980 loan aid and technical cooperation include ODA disbursements from previous years as well.

^c In some cases figures are not consistent with the total due to rounding.

Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

Thailand dan Malaysia adalah dua negara yang juga terkena dampak krisis ekonomi tahun 1997. Namun kedua negara ini dapat dalam waktu singkat mengatasi dampak krisis ekonomi dan segera melakukan penyesuaian terhadap lingkungan global yang sedemikian cepat berubah. Saat ini baik Thailand maupun Malaysia telah siap untuk berkompetisi dengan Cina dan India. Pemerintah Thailand bekerja keras untuk mendorong kewirausahaan dalam negeri, mengurangi jurang ekonomi daerah perkotaan dan pedesaan, dan terus berusaha menarik investasi asing. Sementara Malaysia menjalankan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam negeri serta mengurangi

proteksionisme. Di samping itu, Malaysia juga aktif menjadikan negaranya sebagai pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan internasional¹⁰¹.

Sementara itu, Singapura yang kurang terpengaruh oleh krisis keuangan Asia juga bergerak cepat melakukan penyesuaian diri dengan, antara lain, meliberalkan sektor-sektor ekonomi tertentu. Perbankan, telekomunikasi, pelayanan dan media massa adalah sektor-sektor ekonomi utama yang diliberalisasikan pemerintah Singapura. Pada saat yang sama Singapura merupakan negara ASEAN yang paling sukses menarik modal asing paska krisis ekonomi dalam bidang elektronik, farmasi dan kimia. Di antara negara-negara ASEAN yang kurang berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini adalah Indonesia dan Philipina. Walaupun kondisi ekonomi kedua negara telah mulai membaik paska krisis keuangan tahun 1997, kemampuan kedua negara menarik investasi asing tidak sekuat tetangganya, misalnya Singapura. Bahkan beberapa investor asing justru menarik investasinya dari Indonesia dan memindahkannya ke negara lain¹⁰².

ASEAN secara kolektif menanggapi tantangan Cina dan India ini dengan meningkatkan daya tariknya seperti mengembangkan pertumbuhan *Asean Economic Community* dan juga memperkuat ASEAN + 3. Menarik untuk dicatat bahwa di antara negara ASEAN Singapura adalah negara anggota yang paling aktif mengembangkan kerjasama bilateral dengan negara-negara maju di luar ASEAN¹⁰³.

Perbedaan yang cukup menyolok antara masing-masing negara anggota ASEAN dalam usahanya menarik modal asing dan dalam mengembangkan kerjasama bilateral adalah kenyataan yang tampaknya selalu menjadi ciri khas ASEAN. Jika perbedaan ini terus berlangsung bukan tidak mungkin di masa depan akan menjadi salah satu batu penghalang bagi kelangsungan ASEAN selaku organisasi regional.

Sementara itu, Cina terus melakukan pendekatan intensif ke ASEAN dengan mengerem ambisi teritorialnya di kepulauan Sparty dan pada saat yang bersamaan mendorong dan melibatkan diri dalam proses multilateral yang sedang

¹⁰¹ Bhaskaran, Hlm. 75.

¹⁰² Bhaskaran, Hlm. 76.

¹⁰³ Bhaskaran, Hlm. 77.

dikembangkan ASEAN. Untuk memperhalus jalan ke ASEAN pada bulan Oktober tahun 2003 Cina sepakat menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* bersamaan dengan Pertemuan Puncak ASEAN + 3 di Bali. Cina memutuskan untuk menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation* setelah Kongres Rakyat Nasional Cina memutuskan untuk mendukung rencana tersebut pada bulan Juni sebelumnya. Cina adalah negara non-ASEAN pertama yang menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation*¹⁰⁴. Cina juga memanfaatkan kekuatan ekonominya yang sedang tumbuh pesat untuk melakukan kerjasama ekonomi lebih luas dengan negara-negara ASEAN. Cina aktif mendukung pengembangan ASEAN + 3. Cina juga aktif terlibat dalam *Asean Regional Forum* (ARF) dan memprakarsai pembentukan *Asean Regional Forum Security Policy Conference* (ARFSPC) yang melibatkan para pejabat senior bidang pertahanan di Beijing. Di samping itu, *ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Security* (disepakati tahun 2003) juga telah menghasilkan Rencana Aksi pada November 2004¹⁰⁵.

Upaya pengembangan kerjasama dalam sektor ekonomi ini juga diharapkan untuk menekan kecurigaan ASEAN terhadap meningkatnya kekuatan ekonomi dan militer Cina. Kemajuan-kemajuan yang ditunjukkan Cina di Asia Tenggara sudah barang tentu tidak dapat dilepaskan dari strategi Cina untuk membendung peningkatan pengaruh Amerika di ASEAN paska invasi ke Iraq. Meningkatnya kerjasama militer negara anggota ASEAN dengan Amerika juga merupakan respons ASEAN untuk mengimbangi pengaruh ekonomi Cina yang terus meluas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN tampaknya cukup hati-hati mengelola hubungan kedua negara raksasa ini karena hubungan Amerika dan Cina sering berubah negatif jika terkait dengan isu Taiwan. Konflik Amerika-Cina dengan demikian dapat berakibat negatif terhadap masa depan ASEAN¹⁰⁶.

Kemajuan Cina di ASEAN sudah tentu tidak lepas dari perhatian Jepang yang sejak tahun 1980-an merupakan investor asing terbesar di Asia Tenggara. Sekalipun demikian, walaupun paska Perang Dingin muncul berbagai gagasan di

¹⁰⁴ Richard Stubbs, "ASEAN in 2003: Adversity and Response", *Southeast Asian Affairs* 2004, Singapura: ISEAS, 2004, Hlm. 8.

¹⁰⁵ Huxley, Hlm. 16.

¹⁰⁶ Huxley, Hlm. 16.

dalam negeri agar Jepang meningkatkan kemandirian dalam bidang politik dan keamanan, Jepang tetap menjadikan kerjasama keamanan dengan Amerika sebagai kebijakan keamanan utama Jepang. Oleh karena itu, opsi Jepang untuk meningkatkan hubungan non-ekonomi dengan ASEAN menjadi terbatas. Didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan garis suplai minyak dan gas serta komoditi perdagangannya di laut Cina Selatan dan Selat Malaka, Jepang memprakarsai kerjasama patroli kawasan laut dengan ASEAN dalam format “*Ocean Peacekeeping*”¹⁰⁷. Diluar harapan Jepang, pemerintah-pemerintah ASEAN agak segan menerima ajakan ini karena khawatir akan keterlibatan militer Jepang yang terlalu jauh. Di samping itu, ASEAN juga ingin menjaga posisi Amerika yang telah cukup banyak memberikan jaminan bagi kebutuhan keamanan regional ASEAN melalui berbagai kerjasama militer atau latihan bersama yang cukup intensif paska invasi AS ke Iraq.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa antara tahun 1994 hingga krisis tahun 1997, ASEAN mengalami defisit perdagangan yang besar dengan Jepang, tetapi mengekspor dalam jumlah kecil ke Cina, walaupun hingga tahun 2001, Cina telah mengimpor barang dalam jumlah yang kurang lebih sama dengan yang Jepang impor dari negara ASEAN. Kemudian, antara tahun 1998 dan 2001, tiba-tiba Cina juga mengalami defisit perdagangan dengan ASEAN sejumlah 14.6 miliar dolar, sedangkan Jepang mencetak surplus perdagangan dengan ASEAN sejumlah hampir 23 miliar dolar¹⁰⁸. ASEAN mengalami defisit perdagangan dengan Jepang berarti ASEAN lebih banyak mengimpor barang dibandingkan mengekspor barang ke Jepang, dengan kata lain ASEAN lebih banyak membeli dibanding menjual (www.aseansec.org).

Ketika membandingkan kedua bentuk kerjasama antara Jepang-ASEAN dan Cina-ASEAN perlu dilihat bahwa sekalipun Jepang-ASEAN memiliki sejarah kerjasama ekonomi yang lebih lama dibandingkan dengan Cina-ASEAN, begitupun dengan peranan Jepang yang lebih besar, akan tetapi tampaknya Cina bergerak lebih cepat dibandingkan Jepang di dalam mendekati diri dengan

¹⁰⁷ Huxley, Hlm. 17.

¹⁰⁸ ASEAN-Japan Cooperation, Hlm. 226.

ASEAN. Ditambah Cina sendiri memperlakukan ASEAN sebagai sebuah “kawasan” yang stabil¹⁰⁹.

Salah satu prioritas penting dari ASEAN saat ini juga adalah dengan adanya hubungan ekonomi dengan Cina yang telah bergabung di *World Trade Organization* (WTO) dan menguatkan posisi Cina sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedepannya. Di bulan November 2001, ASEAN dan Cina setuju untuk mendeklarasikan sebuah perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) untuk 10 tahun kedepan. Sebuah perjanjian yang dinilai diluar atau bahkan karena adanya kekhawatiran negara-negara ASEAN sendiri terhadap ancaman Cina (*Chinese threat*). Dalam konteks ini, program yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Koizumi terlihat oleh ASEAN sebagai bentuk ajakan berkompetisi secara terbuka dengan Cina. Sekalipun demikian, dilihat dari sudut pandang Jepang, adanya keinginan untuk menguatkan posisi Tokyo sebagai wilayah yang vital sejak Beijing mulai masuk dan memperkuat pengaruhnya beberapa tahun terakhir¹¹⁰. Di sisi lain Cina adalah pemain penting yang menanti agar posisi Tokyo dapat diganti oleh Beijing.

Pada kenyataannya, Cina sebagai partner utama tidak hanya di dalam bidang ekonomi saja akan tetapi sebagai bagian dari ASEAN + 3 bersama Jepang dan Korea Selatan tetapi juga di *Asean Regional Forum* (ARF). Melihat kekuatan Cina ini, Perdana Menteri Koizumi juga menawarkan suatu bentuk perluasan dari *Pacific Community* yang di dalamnya juga terdapat Australia dan New Zealand¹¹¹.

Akan tetapi membangun suatu solidaritas regional bukanlah hal yang mudah. Untuk satu hal, negara-negara ASEAN sendiri sudah cukup dibebankan dengan masalah-masalah dalam negeri termasuk pemulihan ekonomi negara setelah adanya krisis Asia di tahun 1997. Apa yang mereka butuhkan adalah bantuan ekonomi dari Jepang terutama peningkatan jumlah bantuan dari *Official Development Assistance* (ODA), yang justru sudah mulai dihentikan dananya oleh Tokyo pada awal tahun 2002. Dengan logika ini, program yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Koizumi menjadi kontradiksi. Sekalipun demikian, janji akan

¹⁰⁹ ASEAN-Japan Cooperation, Hlm. 230.

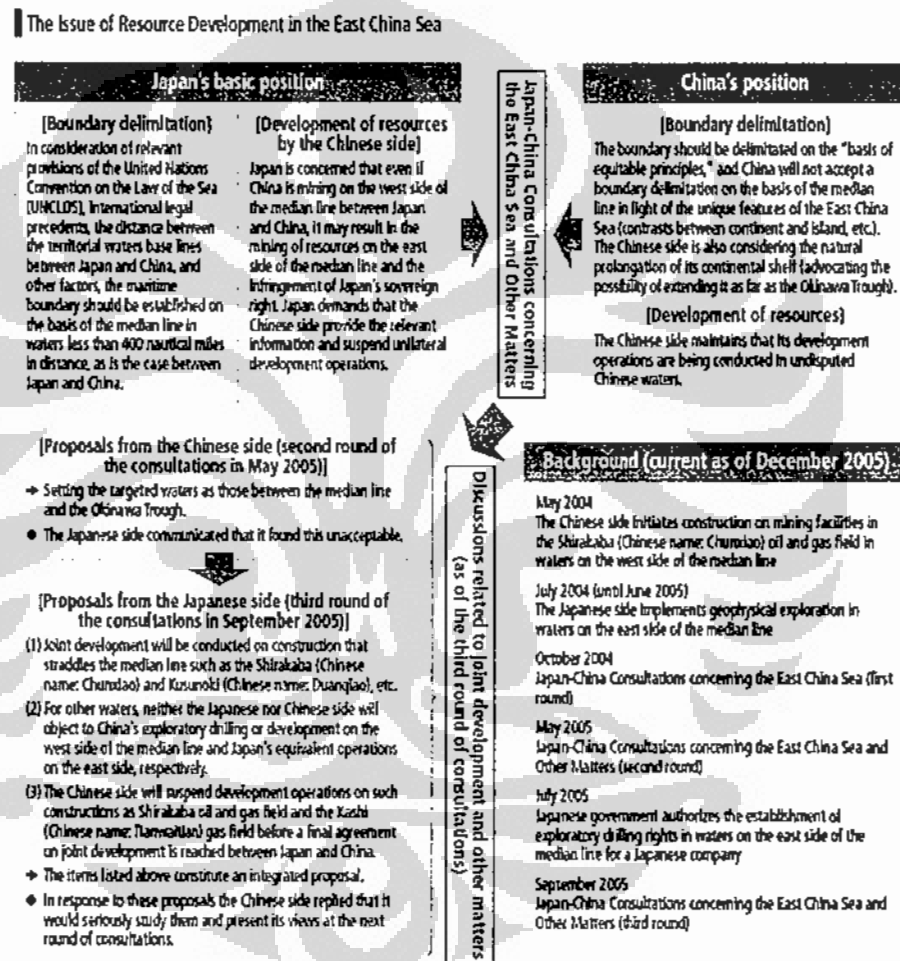
¹¹⁰ Aurelia George Mulgan, Hlm. 198.

¹¹¹ Aurelia George Mulgan, Hlm. 199.

bantuan dana sulit disepakati ketika Jepang sendiri sedang mengalami krisis ekonomi di negaranya.

Tidak hanya itu akan tetapi hubungan Jepang-Cina di ASEAN juga menyangkut permasalahan wilayah di Laut Cina Selatan sebagaimana yang ditulis di dalam Japan's Diplomatic BlueBook 2006 berikut¹¹²:

Gambar III.4



Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

III.3.1 Tahapan hubungan dengan Jepang - Cina - ASEAN

Hubungan kerjasama Cina dan ASEAN dimulai di tahun 1991, yakni dengan hadirnya Perdana Menteri Cina pada saat itu yakni Qian Qichen ke acara pembukaan 24th ASEAN Ministerial Meeting yang berlangsung di Kuala Lumpur.

¹¹² Lihat pada www.mofa.go.jp.

Pada saat itulah Cina menyatakan ketertarikan dan keinginannya untuk menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1993, baru keinginan Cina terwujud dan akhirnya menyepakati beberapa bentuk kerjasama dengan ASEAN di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada bulan Juli tahun 1996, Cina mulai menjadi partner ASEAN untuk berdiskusi dan tepatnya di tahun 1997 Cina dan ASEAN menandatangani *ASEAN-China Joint Cooperation Committee* dan *ASEAN-China Cooperation Fund*. Sedangkan mulai di tahun 2002, dirancanglah konsep kerjasama ekonomi melalui *ASEAN-China FTA* yang akan berlangsung hingga 2010.

Tampaknya, penerimaan negara-negara ASEAN cukup baik terhadap usul pembentukan kawasan perdagangan bebas dengan Cina berdasarkan pertimbangan politik dan ekonomi. Hal ini dapat terlihat pada KTT ke-7 ASEAN tahun 2001, di mana proses persetujuan untuk merundingkan kawasan perdagangan bebas itu tidak melalui pembahasan yang mendalam pada tingkat pejabat senior, sebagai mana lazimnya proses perundingan perjanjian¹¹³.

Upaya ASEAN untuk mengajak Cina ke dalam proses dialog politik dan keamanan di kawasan telah berlangsung lama. Dengan begitu keinginan Cina untuk meningkatkan dialog dengan ASEAN langsung dapat diterima dengan baik oleh ASEAN. Bagi ASEAN diplomasi ekonomi diyakini akan dapat meningkatkan hubungan politik dan keamanan dengan Cina, dan ASEAN sendiri berusaha meyakinkan Beijing bahwa kawasan Asia Tenggara yang sejahtera dan stabil akan dapat memberikan jaminan keamanan bagi Cina.

Inisiatif Jepang yang memilih mengembangkan perdagangan bebas secara bilateral dengan negara-negara ASEAN, dipandang tidak meyakinkan oleh ASEAN yakni strategi Jepang melihat ASEAN secara bilateral dan regional dalam mengembangkan perdagangan bebas dengan ASEAN. Alasan yang dikemukakan Jepang, adalah karena adanya variasi tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara ASEAN yang berbeda. Di lain pihak ASEAN memandang bahwa

¹¹³ Lihat tulisan Dewa Made Sastrawan, Counselor pada Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan AsiaPasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI Yang diakses pada <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2005/12/13/brk,20051213-70561,id.html>

pendekatan ini merupakan taktik Jepang untuk tidak membiarkan ASEAN secara bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan perundingan dengan Jepang¹¹⁴.

Sedangkan untuk Jepang, hubungan dengan ASEAN dimulai jauh di tengah tahun 1950-an bahkan sebelum ASEAN sendiri terbentuk di tahun 1967. Hubungan ini juga lebih banyak terjadi demi perbaikan kondisi negara Jepang paska perang dimana baru di tahun 1977 Jepang dan ASEAN memulai kerjasamanya yang serius di setelah dikeluarkannya *Fukuda Doctrine*.

Dimulai sejak tahun 1980-an, Jepang dan ASEAN mulai banyak menjalin kerjasama seperti *The Pacific Economic Cooperation Council* dan *Asia Pacific Economic Cooperation* di tahun 1989. Pada tahun 1997, Perdana Menteri Hashimoto Ryutaro juga sempat menyatakan *Hashimoto Doctrine* yang menyebutkan adanya pengembangan bentuk kerjasama yang lebih luas dan mendalam yang mencakup beberapa aspek dengan negara-negara ASEAN.

Paska serangan 11 Setember 2001 di Amerika, Perdana Menteri Junichiro Koizumi mendapat tugas penting untuk bisa terus membangun hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Tepatnya di bulan Januari 2002, Perdana Menteri Junichiro Koizumi memberikan pidato pertamanya di Singapura mengenai konsep ide *East Asia Community* yang mengusung semboyan "*act together and advance together*". Melalui ide ini yang nantinya berkembang menjadi konsep awal dari *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership*.

Perdana Menteri Junichiro Koizumi pun setelah itu mengunjungi beberapa negara ASEAN dan menawarkan kerjasama yang mengandung 3 pilar yakni *pertama*, memajukan kesejahteraan ekonomi; *kedua*, meningkatkan sumber daya manusia dan yang *ketiga*, menciptakan demokrasi pemerintahan yang stabil di ASEAN¹¹⁵. Sebuah kunjungan-kunjungan awal yang pada akhirnya melahirkan *Koizumi Doctrine* seperti yang sudah dibahas di BAB II sebelumnya.

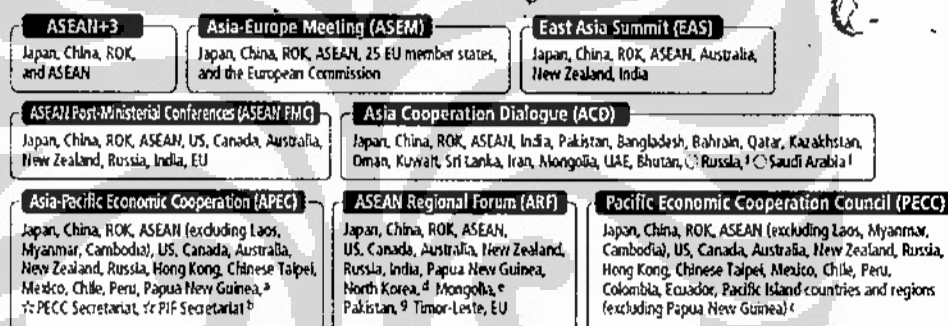
Selain itu terdapat beberapa bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh Jepang dengan negara-negara ASEAN yang juga ditulis pada Japan's Diplomatic BlueBook 2006 sebagai berikut¹¹⁶:

¹¹⁴ Lihat pada tulisan Dewa Made Sastrawan, Counselor pada Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan AsiaPasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI yang diakses pada <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnergi/2005/12/13/brk,20051213-70561,id.html>

¹¹⁵ Kawaguchi 2003

¹¹⁶ Lihat pada www.mofa.go.jp.

1. Japan - ASEAN Summit Meeting
2. Japan – ASEAN Forum
3. Japan – ASEAN Cooperation
4. ASEAN Post Ministerial Conference (PMC)
5. ASEAN + 3 Meeting
6. ASEAN Regional Forum (ARF)
7. East Asia Summit (EAS)
8. ASEAN – Japan Exchange Year 2003
9. Asia Cooperation Dialogue (ACD)
10. ASEAN – Japan Comprehensive
11. Economic Partnership Agreement (EPA)



‡ Attends the AMM as an observer.

† † participate as observers.

‡ Pacific Island countries and regions (PIF) is made up of the following plus Australia and New Zealand: Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Solomon Islands, Vanuatu, Tonga, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Marshall Islands, Palau, the Cook Islands, and Niue.

‡ North Korea: Participated in the ARF for the first time in July 2000.

† Mongolia: Its participation was approved at the 5th Ministerial Meeting in 1999.

○ are countries whose participation was approved at the Foreign Ministers' Meeting in April 2005.

‡ Pakistan: Participated in the ARF for the first time in July 2004.

Source: Japan's Diplomatic BlueBook 2006

III.4 Koizumi Doctrine: Persaingan Jepang-Cina di ASEAN

Dalam hubungan internasional, banyak analisis percaya bahwa setiap negara memiliki kecenderungan untuk memperbesar *power* yang memiliki arti berupa kekuasaan atau kekuatan. Sebagaimana ditulis sebelumnya bahwa H. J. Morgenthau telah mendefinisikan politik dalam negeri maupun internasional sebagai upaya perjuangan memperoleh kekuasaan. Dalam hal ini baik Jepang maupun Cina berupaya untuk memperoleh kekuasaan.

Salah satu tujuan dari negara adalah memperluas *influence* (pengaruh) dimana *power* juga dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan sebuah

negara. Di dalam hubungan dua negara, biasanya akan terjadi interaksi dimana masing-masing negara akan menggunakan *power* yang dimiliki untuk memperluas *influence* negara tersebut.

Dalam konteks hubungan Jepang-Cina-ASEAN, Jepang dan Cina menggunakan *power* yang mereka miliki untuk sama-sama memperluas *influence* mereka di Asia Tenggara dalam hal ini melalui kerjasama regional di bidang perekonomian. Rivalitas antara Jepang dan Cina ini terwujud dalam dinamika hubungan kedua negara di dalam merespon kondisi yang ada di Asia Tenggara. Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Morgenthau sebelumnya mengenai adanya *power* yang diartikan sebagai sebuah *influence* ataupun pengaruh, maka Jepang pun ingin agar pengaruhnya tetap ada di kawasan Asia Tenggara yang secara tidak langsung menandakan bahwa Jepang memang memiliki *power* atas kawasan tersebut melalui kerjasama-kerjasama eksklusif yang dimilikinya. Cina, yang juga ingin memiliki *power*, tidak kalah upayanya di dalam memberikan pengaruh ataupun *influence* di negara-negara Asia Tenggara yang tentu saja akan membuat posisi Jepang menjadi tidak nyaman.

Penulis melihat bahwa pertimbangan Jepang dan Cina menjalin kerja sama ekonomi regional dengan ASEAN lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa kedua negara tersebut, Jepang dan Cina, memiliki sejarah konflik yang cukup panjang yang membuat keduanya saling menganggap satu sama lainnya sebagai ancaman. Mulai dari sejarah Jepang yang menginvasi Cina, pembuatan buku sejarah Jepang yang menghapuskan peristiwa invasi ke Cina, kunjungan Jepang ke kuil Yasukuni dan kekhawatiran Cina jika Jepang kembali menjadi negara yang memiliki kekuatan militer. Jepang sendiri tidak menyukai keberhasilan Cina duduk sebagai anggota Dewan Keamanan di PBB dan juga tidak menyukai keberhasilan ekonomi Cina yang bisa mengancam posisi Jepang. Untuk itu keduanya juga telah melihat ASEAN sebagai wadah atau area perebutan untuk mencapai *influence power* sebagai pemimpin pembangunan ekonomi kawasan.

Sebuah inisiatif yang kemudian dikeluarkan oleh Jepang yakni *Koizumi Doctrine* jelas dikeluarkan dua bulan setelah para pemimpin ASEAN sepakat dengan Perdana Menteri Cina untuk menandatangani sebuah perjanjian kawasan

perdagangan bebas. Penulis melihat peristiwa ini telah menunjukkan adanya kekhawatiran dari Jepang atas menurunnya pengaruh negara Jepang di ASEAN sebagai akibat meningkatnya dialog kerjasama antara ASEAN dengan Cina.

Dengan semakin maju dan kuatnya perekonomian Cina, Jepang juga khawatir akan kehilangan status kepemimpinannya dalam dinamika perekonomian di kawasan Asia sebagaimana sejak berakhirnya Perang Dunia II melalui paradigma "angsa terbang" (*flying geese*), dimana Jepang telah menjadi pemimpin kemajuan industri dan pertumbuhan perekonomian Asia¹¹⁷. Jika dilihat melalui sejarahnya, Jepang sendiri juga mengalami suatu keajaiban ketika berhasil bangun dari keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh kekalahan Jepang setelah Perang Dunia II. Suatu kebanggaan dan juga *prestige* tersendiri bagi Jepang yang kemudian memiliki *power* sebagai negara yang memiliki perekonomian yang luar biasa dan menjadi acuan bagi negara-negara berkembang lainnya. Untuk itu pun, merupakan suatu kebanggaan bagi Jepang menjadi "pemimpin" di kawasan ASEAN.

Namun, sejak terjadinya krisis keuangan di Asia pada tahun 1997, kepemimpinan Jepang di negara-negara ASEAN mulai mengalami penurunan. Krisis ekonomi di dalam negeri Jepang sendiri yang berkepanjangan juga telah menghambat kemampuan Jepang untuk memainkan perannya sebagai pemimpin pergerakan ekonomi di kawasan secara maksimal seperti sebelumnya. Sementara itu, dengan pesatnya kemajuan dan tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi, Cina juga ternyata sudah mulai memposisikan diri sebagai "pemimpin" perkembangan ekonomi di kawasan ASEAN yang baru. Negara ini juga bahkan telah menjadi negara pengekspor ke-4 terbesar di dunia dan menyerap hampir sepertiga dari total investasi asing yang ditujukan ke negara-negara berkembang¹¹⁸. Dengan prestasi ini, Cina mulai dipandang sebagai partner baru dan pimpinan baru yang potensial di ASEAN.

¹¹⁷ Lihat tulisan Dewa Made Sastrawan, Counselor pada Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan AsiaPasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI Yang diakses pada <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2005/12/13/brk,20051213-70561,id.html>

¹¹⁸ Lihat tulisan Dewa Made Sastrawan, Counselor pada Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan AsiaPasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI Yang diakses pada <http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2005/12/13/brk,20051213-70561,id.html>

Berdasarkan kondisi ini, maka Jepang mulai memikirkan strategi-strategi baru untuk mempertahankan apa yang sudah dimilikinya di ASEAN dan Jepang berupaya kembali merebut pengaruhnya yang sudah mulai menurun di ASEAN. Di tahun 2001, ketika Cina berhasil menandatangani perjanjian dengan ASEAN melalui *Free Trade Agreement (FTA)*, maka peristiwa ini dijadikan waktu yang tepat bagi Jepang untuk juga mengeluarkan kebijakan dan membuat perjanjian baru dengan negara-negara ASEAN. Tepat di tahun 2002, Perdana Menteri Koizumi mengeluarkan pernyataannya melalui apa yang kemudian disebut dengan *Koizumi Doctrine*. Tentu saja dengan dikeluarkannya doktrin ini, diharapkan ASEAN akan kembali menjadi partner Jepang yang bisa memberikan Jepang posisi kembali di atas Cina dan memiliki *power* atas negara-negara ASEAN.

Menurut Daniel S. Papp, kepentingan negara atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara merupakan kepentingan nasional negara. Jepang lebih banyak mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian di sebabkan karena kekuatan Jepang sendiri berada di bidang ekonomi. Menghadapi Cina sebagai negara yang juga memiliki perekonomian yang cukup baik dan mengalami peningkatan yang signifikan mungkin bukan sesuatu masalah yang besar bagi Jepang. Akan tetapi jika ditambah dengan kekuatan militer Cina yang tidak bisa disamakan, maka Jepang sangat wajar jika menghadapi ketakutan akan kekuatan dari rivalnya ini. Untuk itu kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan Jepang juga mewakili kondisi dan situasi serta keinginan dari apa yang menjadi kepentingan Jepang.

BAB IV

Penutup

Sebagai sebuah negara, tidak dipungkiri adanya keinginan untuk memiliki kekuatan sebagai sebuah negara di dunia. Kebijakan yang dikeluarkan suatu negara merupakan hasil dari apa yang menjadi kepentingan negara. Kebijakan *Koizumi Doctrine* dikeluarkan oleh Jepang atas dasar kepentingan negara Jepang yang mencakup upaya untuk memiliki *power*. Pengaruh atau *power* ini yang tadinya sudah didapatkan melalui kepercayaan negara-negara ASEAN di dalam melakukan kerjasama dengan Jepang, akhirnya mengalami kekhawatiran ketika Cina kemudian masuk menjadi partner negara-negara ASEAN yang baru. Jepang pun merasa pentingnya untuk kembali memperoleh *power* dan *influence* dari Cina di ASEAN.

Dengan demikian, maka penulis melihat bahwa *Koizumi Doctrine* yang dikeluarkan tahun 2002, terjadi sebagai bentuk tindakan reaktif atas kondisi dan situasi yang terjadi di ASEAN ketika mulai melakukan kerjasama dengan negara Cina seperti *Free Trade Agreement (FTA)* yang dibentuk pada tahun 2001. *Koizumi Doctrine* yang kembali menekankan pentingnya hubungan dengan ASEAN adalah wujud keinginan Jepang untuk meraih kembali kepercayaan dan menegaskan *power* yang dimilikinya di ASEAN. Untuk itu maka *Koizumi Doctrine* memang terbentuk dalam konteks persaingan Jepang dengan Cina di ASEAN.

Untuk negara-negara ASEAN yang dalam hal ini dilihat sebagai suatu arena atau area tempat Jepang dan Cina berlomba untuk menjadi pemimpin negara-negara ini, maka ASEAN perlu mewaspadaai sikap yang akan diambil ke depannya. Tidak menutup kemungkinan apabila Jepang dan Cina sudah tidak lagi menganggap ASEAN menjadi tempat yang bisa memberikan apa yang diinginkan Jepang dan Cina maka ASEAN akan ditinggalkan. Untuk itu ASEAN pun harus memperkuat posisinya di mata dunia.

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, maka penulis melihat beberapa *point* penting sebagai berikut:

Kebijakan Luar Negeri Jepang	Yoshida Doctrine	Fukuda Doctrine	Miyazawa Doctrine	Koizumi Doctrine
Waktu dikeluarkannya kebijakan	Pasca Perang Dunia II	1977	1993	2002
Konten dan Isi kebijakan	Menyatakan bahwa Jepang akan fokus di dalam pembangunan ekonominya dan tidak akan menggunakan kekuatan militernya.	Menyatakan bahwa Jepang akan menjadi partner negara-negara ASEAN yang setara dan akan menjadi negara yang menganut perdamaian tanpa kekuatan militer.	Menyatakan perlunya sebuah forum dan mitra dialog di ASEAN di dalam menghadapi ancaman permasalahan keamanan.	Menyatakan kembali pentingnya kerjasama dengan ASEAN dan keinginan untuk memperluas bidang kerjasama dengan ASEAN
Latar Belakang dikeluarkannya kebijakan	Kekalahan Jepang Pasca Perang Dunia II yang membuat perekonomian Jepang mengalami keterpurukan dan Jepang berupaya untuk melakukan pemulihan perekonomian negara.	Timbulnya persepsi anti-Jepang di negara-negara ASEAN yang membahayakan posisi Jepang di ASEAN sehingga dirasa perlu mengeluarkan suatu kebijakan baru untuk memperbaiki citra Jepang.	Mulai berkembangnya kekuatan-kekuatan militer dari negara-negara lain yang juga dapat membahayakan posisi Jepang yang tidak memiliki kekuatan militer.	Munculnya Cina sebagai kekuatan ekonomi baru dunia yang juga sudah masuk ke wilayah ASEAN dan membuat beberapa kerjasama regional diantaranya FTA yang dibuat di tahun 2001.

Daftar Referensi

Abdul Irsan, *Politik Domestik, Global and Regional Jepang*, Hassanudin University Press, 2005.

Abdul Irsan, *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*, Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.

ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community, Japan Centre for International Exchange. Tokyo. New York, 2003.

Aurelia George Mulgan, *Japan's Failed Revolution: Koizumi and the Politics of Economic Reform*, Asia Pasific Press, 2002.

Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*. Pustaka Pelajar, 2007

Barry Fulton, *Reinventing Diplomacy in the Information Age*, CSIS Washington D.C, 1998.

Bruce Stokes and Michael Aho, Asian Regionalism and U.S. Interests, dalam *The United States, Japan and Asia: Challenges for U.S. Policy*, Gerald E. Curtis (Ed), New York: W.W Norton & Company, 1994.

Charles E. Morrison, Southeast Asia and U.S.-Japan Relations, dalam *The United States, Japan and Asia: Challenges for U.S Policy*, Gerald E. Curtis (Ed), New York: W.W.Norton & Company, 1994

Chalmers Johnson, *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy*, Tokyo: Charles E. Turtle Company, 1982

Chia Siow Yue, East Asian Regionalism and the ASEAN-Japan Economic Partnership dalam *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for International Exchange. Tokyo. New York, 2003.

Chien Peng Chun, Southeast Asia-China Relations: Dialectics of 'Hedging and Counter Hedging dalam *Southeast Asian Affairs 2004*, Singapura: ISEAS, 2004.

Christopher B. Johnstone, Paradigms Lost: Japan's Asia Policy in a Time of Growing Chinese Power, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 21, No. 3, December 1999

Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, Palgrave Macmillan, 2003.

Chulacheeb Chinwanno, The Dragon, The Bull and The Rice talks: The Roles of China and India in Southeast Asia dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2005.

Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations*. Allyn and Bacon, 1997.

David Chee-Meow Sheah, ASEAN and Japan's Southeast Asian Regionalism, dalam *Japan's Asian Policy: Revival and Response*, Takashi Inoguchi (ed), New York: Palgrave Macmillan, 2002.

Declan Hayes, *Japan the Toothless Tiger: A Provocative Look at Japan's Expanding Role In The Future of Asia*, Massachusetts: Tuttle Publishing, 2001.

Dennis D. Trinidad, Japan's ODA at The Crossroads: Disbursement Patterns of Japan's Development to Southeast Asia, dalam *Asian Perspective*, Vol. 31, No. 2, 2007.

Denis Hew, *Southeast Asian Economies: Toward Recovery and Deeper Integration*, Southeast Asian Affairs 2005, Singapore: ISEAS, 2005.

Donald E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia the Struggle for Autonomy*, Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., 2005.

Glenn D. Hook, Julie Gilson, Christopher W. Hughes and Hugo Dobson, *Japan's International Relations*, Sheffield Centre for Japanese Studies, Routledge Series.

Greg Austin and Stuart Harris, *Japan and Greater China: Political and Military Power in the Asian Century*, Hurst and Company, London, 2001.

Hadi Soesatro, Toward An East Asian Regional Trading Agreement, dalam Simon C. Tay, Jesus P. Estanislao, Hadi Soesatro (Eds) *Reinventing ASEAN*, Singapura, ISEAS, 2001.

Haruko Satoh, *Japan: Towards a Future-oriented Relationship with China?*, dalam Workshop on East Asia Facing a Rising China, East Asian Institute, National University of Singapore, 2008.

Indonesian Perspectives, Volume II, No: 1, 2005, *Japan and the Economic Crisis in Indonesia*, CIRES, 2005.

Jurnal Hukum Internasional Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Jusuf Wannadi, *ASEAN-Japan Relations: The Underpinning of East Asian Peace and Stability dalam ASEAN Japan Cooperation, A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for International Exchange, 2003.

Kenneth B. Pyle, Japan's Emerging Strategy in Asia dalam Ellings and Simon (eds), *Southeast Asian Security in the New Millenium*, Armonk, New York: M.E. Sharpe, Inc., 1996

Leonard J. Schoppa, Domestic Politics dalam Steven K. Vogel (ed), *US-Japan Relations in a Changing World*, Brookings Institution Press Washington D.C, 2002.

Manu Bhaskaran, Economic Impact of China and India on Southeast Asia, *Southeast Asian Affairs 2005*, Singapura: ISEAS, 2005.

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, 1990.

N. Ganesan, ASEAN's Relations with Major External Powers, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, Vol.22, Issue 2, August 2000.

Narongchai Akrasanee and Apichart Praset, The Evolution of Asean-Japan Economic Cooperation dalam *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for International Exchange. Tokyo. New York, 2003.

Reuben Mondejar and Wai Lung Chu, ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions, dalam Ho Khai Leong and Samuel C.Y.Ku (Eds), *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, Singapura: ISEAS, 2005.

Richard Stubbs, *ASEAN plus Three: Emerging East Asian Regionalism*, Asian Survey, Vol. XLII, No. 3, May/June 2002.

Syamsul Hadi, "Ambivalensi Politik Internasional Jepang", dalam Kompas, 21 Maret 2007.

Syamsul Hadi, "Jepang Pasca Abe", dalam Kompas, 14 September 2007.

Syamsul Hadi, *Checkbook Diplomacy Jepang dalam hubungan dengan ASEAN: Relevansi dan Tantangan bagi Indonesia dalam Jurnal Hukum Internasional* Volume 6, No: 2, Januari, 2009, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah, An overview of ASEAN-China Relation dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2005.

Shen Danyang, ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospects dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2005.

Steven K. Vogel (Ed), *US-Japan Relations in a Changing World*, Brookings Institution Press Washington D.C, 2002.

Soeya Yoshihide, Japan as A Regional Actor dalam *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for International Exchange. Tokyo. New York, 2003.

Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Takeshi Inoguchi, *Japan's Foreign Policy in an era of Global Change*, Printer Publisher Ltd, London, 1993.

Takashi Inoguchi (Ed), *Japan's Asian Policy: Revival and Response*, New York: Palgrave Macmillan, 2002.

The National Institute for Defense Studies Japan, *East Asian Strategic Review*, the Japan Time, 2003.

The World Bank, *China 2020: China Engaged*. Washington, DC: The World Bank, 1997.

Wendy Dobson, *Japan in East Asia: Trading and Investment Strategies*, Singapore: ISEAS, 1993.

Wibowo, I. *Belajar Dari Cina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.

William W. Grimes, Economic Performance dalam Steven K. Vogel (ed), *US-Japan Relations in a Changing World*, Brookings Institution Press Washington D.C, 2002.

Zhang Yunling, The Asean Partnership with China and Japan dalam *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, Japan Centre for International Exchange. Tokyo. New York, 2003.

Zhang Xioji, Ways Toward East Asian FTA: The Significant Roles of ASEAN and China dalam Saw Swee Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah (eds), *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2005.

Lampiran 1: *Koizumi Doctrine***Speech by Prime Minister of Japan Junichiro Koizumi**

Japan and ASEAN in East Asia
- A Sincere and Open Partnership -

January 14, 2002

Singapore

Your Excellency, Prime Minister Goh Chok Tong,
Your Excellency, Deputy Prime Minister
and Minister for Defence Tony Tan,
Ladies and Gentlemen,

I am greatly honored to give this speech here in Singapore, the final stop on my schedule of visits to the countries of ASEAN.

Singapore is a remarkable nation with remarkable people. Bursting through the constraints of size and resources, Singapore through sheer energy and willpower has created a tremendous place for itself in the world. Through its economic and diplomatic vitality, it contributes to the international community far in excess of what size alone would warrant. And so to the government and people of Singapore, let me express my admiration and respect for your achievements.

I am told that Singapore is called the "Lion City." Maybe it has something to do with my hairstyle, but in Japan I am known as the "Lion Prime Minister." Perhaps that is why I am so delighted to be here in the Lion City.

Today I would like to speak about cooperation between Japan and ASEAN and my concept of how this cooperation can contribute to all of East Asia.

(lanjutan)

Let me begin by defining what cooperation truly is. Cooperation is working in common purpose with others in order to accomplish more. In the simplest terms, this is what I would like to see Japan and ASEAN accomplish-more prosperity, more peace, more understanding, more trust. This cooperation requires an exchange of ideas, opinions and people.

Exchanges between Japan and the countries of Southeast Asia have a long history. As early as the 14th century, the Kingdom of the Ryukyu, which ruled the islands of Okinawa, traded with Thailand. In the 16th century, the sea-borne trade in vermilion seals* was active in the waters that connect East Asia, and a thousand Japanese lived in Ayuthaya, the Thai capital of the period.

* The name derives from the fact in those days foreign trade was authorized by a special seal in vermilion color.

One recent anecdote in particular demonstrates to me how fate has destined exchange between Japan and Southeast Asia. In 1989, a child living on the southern Japanese island of Tanegashima placed a "letter of friendship" in a bottle and set it adrift in the sea. That very same bottle traversed the seas that our ancestors had themselves traveled in trade-and ten years later in 1999 it washed up on the shores of Malaysia. The Malaysian citizen who found the message invited the Japanese child to come to Malaysia, which resulted in both a real and a symbolic exchange.

Today, many kinds of bottles travel between Japan and Singapore-economic, political, diplomatic and cultural. At present, Japan's pop culture has become a part of Singapore's pop culture, and the young people of Singapore are teaching English to young Japanese people. In such ways and many others, our mutual exchanges are passed to the younger generation.

(lanjutan)

The exchanges between Japan and Southeast Asia, of course, also include more formal and diplomatic exchanges. Twenty-five years ago in 1977, then-Prime Minister Takeo Fukuda made a speech in Manila, citing "equal partnership" and "heart-to-heart understanding" between Japan and ASEAN. Based on the fundamental concepts of the "Fukuda Speech," Japan's ASEAN policies have been passed on from that time to each subsequent Cabinet. I, too, am eager to promote such policies.

In the quarter-century since the "Fukuda Speech," the global situation has undergone tremendous change. In Southeast Asia, peace has progressed with the resolution of conflicts in Indochina, resulting in the expansion of ASEAN to ten countries. Democratization and a market economy are also progressing in Asia. The People's Republic of China and Taiwan have joined the WTO. Furthermore, as a result of the terrorist attacks on the United States, we've seen a paradigm shift in security concepts, making patently clear the importance of working together for the sake of peace and stability.

In the 21st century, the changes confronting Japan and ASEAN will be even more swift and momentous. We must face such changes with unflinching resolve and courage. And we must face them together.

Despite enduring difficult trials in the midst of economic globalization, despite living in different stages of economic development, despite a diversity of backgrounds, all of the ASEAN countries increasingly share the basic values of democracy and market economy. Efforts to harmonize the region's diverse histories, societies, cultures and religions have reaped a greater good for all.

I believe that Japan has made a contribution in strengthening the countries of ASEAN. True to the old adage, "A friend in need is a friend indeed," Japan at the time of Asia's financial crisis played a role in easing that crisis. We viewed the situation not just as your challenge but as our own. I believe that Japan-ASEAN relations have reached a new level of maturity and understanding.

(lanjutan)

In the 21st century, as sincere and open partners, Japan and ASEAN should strengthen their cooperation under the basic concept of "acting together--advancing together."

So, what are the areas where we should focus our cooperation as we "act together--advance together?"

First, by undertaking reforms in our respective countries, we will advance individually and jointly toward increased prosperity.

During the mid-19th century, Japan underwent major reforms for modernization known as the Meiji Restoration. At the end of World War II, Japan conducted major reforms based on democracy. Now, in order to adapt to radical changes in the international community of the 21st century, I am convinced that Japan must undergo a "third major reform." Since my appointment as Prime Minister, I have been tackling such reform under the banner of "structural reform without sanctuaries." I know that no great reform is accomplished without pain and resistance. I also know that the countries of ASEAN are awaiting Japan's structural reform and the subsequent return of a dynamic Japanese economy. I realize that when it comes to the global economy, rain does not fall on one roof alone.

The reason that the Japanese economy stagnated for such a long period in the 1990s is clear. Japan's previous success had made us complacent. Despite the significant changes taking place in the global economy, Japan failed to respond by reforming its political and economic structures. Information and communications technologies have rapidly created a single, unified global market. Competition has become much more severe. To succeed under such conditions, a country needs a free and efficient market that can be trusted by global investors and consumers alike. It needs a strong and healthy financial market.

(lanjutan)

These challenges are as important for the countries of ASEAN as they are for Japan. The Asian financial crisis showed us that the ASEAN countries also required new economic structures. Change is not easy for individuals or for countries. Someone once said that courage is the power to let go of the familiar- and that is what we must do. As I mentioned a moment ago, reform will inevitably be accompanied by pain, which eventually will be succeeded by sustainable prosperity.

Japan is ready to support ASEAN's serious efforts of reform. Specifically, Japan offers its cooperation to improve legislation, administrative capabilities and nation-building measures. We offer our help to improve the capabilities of each country to compete economically and to participate in a multilateral trading system based on the WTO. We also offer our cooperation in developing a healthy financial system, which is to a country what the circulatory system is to the human body.

Japan will continue to cooperate in such areas as Mekong Subregion Development so that Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam may accelerate their economic development. It is also important that we continue to cooperate in information and communications technology, which contributes to the integration of ASEAN. Through the swift realization of an ASEAN Free Trade Area and an ASEAN Investment Area, ASEAN should continue to be an attractive place of investment for Japanese companies. To this end, the promotion of supporting industries is also an important part of our cooperation.

The second point is to continue and strengthen our cooperation for the sake of stability.

Instability is not always elsewhere. Sometimes it is at home. Factors for instability are also in the region. Japan for many years now has been the largest contributor of foreign aid in the world.

(lanjutan)

In Southeast Asia, Japan would like to actively cooperate in reducing poverty and preventing conflicts, in such cases as Mindanao, Aceh and East Timor. In particular, by the spring of this year Japan will dispatch a Self Defense Force Engineer Unit to Peace-Keeping Operations in East Timor.

In recent years, Japan has begun to fulfill its international obligations, such as peace-keeping missions. We have dispatched Self Defence Forces to help in Cambodia, Mozambique, Zaire and the Golan Heights. And, in cooperation with the countries of ASEAN, we intend to make an even more active contribution to ensure regional stability here in Southeast Asia. The ASEAN Regional Forum has made steady progress in building confidence and trust on security matters. Now is the time to aim for a higher degree of cooperation. Japan is eager to consider how together we can develop this forum for the future.

Efforts towards democratization in Myanmar must also be accelerated, and this is an endeavor that we fully support.

Together, Japan and ASEAN must also tackle a variety of transnational issues such as terrorism, piracy, energy security, infectious diseases, the environment, narcotics and trafficking in people. These ancient and modern ills represent a major challenge to us all.

Japan-ASEAN cooperation must extend its reach globally. I believe we should increase our cooperation on such issues as peace and reconstruction assistance to Afghanistan, measures for disarmament and non-proliferation and reform of the United Nations. We have a role to play in the world, and we should play it. In particular, I hope to see active participation on the part of the countries of ASEAN at the Ministerial Conference on Reconstruction Assistance to Afghanistan to be held in Tokyo on 21 and 22 January. In the recent past, the people of Southeast Asia have suffered from war and violence; so they well understand the hardship that the people of Afghanistan have endured for so many years.

(lanjutan)

A third area of cooperation between Japan and the countries of ASEAN relates to the future. I would like to propose initiatives in five areas.

One, we must focus on education and human resources development, which form the foundation for national development. I would like to dispatch a governmental mission to ASEAN countries to promote exchange and cooperation between universities. Some Japanese universities have already opened courses in English as well as Japanese language courses for students in ASEAN by utilizing the Internet. Through such efforts I expect that university exchanges will develop. I would also like to continue the training of information and communications technology engineers in both Japan and ASEAN in order to enhance practical opportunities in the region. In addition, I emphasize the importance of the institution building and capacity building in governance, as well as the promotion of supporting industries.

Two, I propose that 2003 be designated as the Year of Japan-ASEAN Exchange. We should present a number of ideas to stimulate exchanges in all areas, including intellectual and cultural. I also believe it would be useful to strengthen the network that links research institutions in Japan and ASEAN countries.

Three, I would like to propose an Initiative for Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership. Of course, we will cooperate in the new round of multilateral trade negotiations under the WTO. At the same time, we must strengthen broad ranged economic partnership by stretching further than trade and investment--to such areas as science and technology, human resource development and tourism. The Japan-Singapore Economic Agreement for a New Age Partnership, which was signed yesterday, is an example of such economic partnership. I would like to see us generate concrete proposals for endorsement at the Japan-ASEAN Summit Meeting.

Four, in order to pursue development in a new era, I propose the convening of an Initiative for Development in East Asia meeting.

(lanjutan)

Based on East Asia's development experiences to date, my hope is that such a meeting would provide an opportunity for us to reexamine where we are and to consider together future models for development-thus raising the standard of living for the peoples of the region.

Five, I propose that Japan and ASEAN security cooperation, including transnational issues such as terrorism, be drastically intensified. Now, more than ever, we realize that one's own security is at stake when a neighbor's wall is ablaze. I believe we need an agreement for regional cooperation on piracy, and I will promote consultation to achieve that end. We must band together to eradicate the plague of piracy. In addition, I would like to strengthen cooperation between the Coast Guard of Japan and ASEAN counterparts. I also wish to promote regional cooperation in strengthening energy security, in light of the gap between rapid increase of energy demand and lagging energy supply within Asia.

Finally, let me turn to how cooperation between Japan and ASEAN should be linked to cooperation with all of East Asia. I believe that East Asia's whole can be greater than the sum of its parts.

Ladies and gentlemen, if you took a poll of the world's economists and asked them what region of the world they believe to have the greatest potential in the immediate future, I have no doubt of their answer. They would say East Asia. By cooperating, I believe we can gain the critical mass to advance this potential.

Our goal should be the creation of a "community that acts together and advances together." And we should achieve this through expanding East Asia cooperation founded upon the Japan-ASEAN relationship. While recognizing our historical, cultural, ethnic and traditional diversity, I would like to see countries in the region become a group that works together in harmony. Our pasts may be varied and divergent, but our futures can be united and supportive of each other.

(lanjutan)

The realization of such a group needs strategic considerations in order to produce positive consequences. And in order to contribute to global challenges, we must play a role in linking our region to the world.

Certainly, such an objective cannot be achieved overnight.

The first step is to make the best use of the framework of ASEAN+3. We should promote cooperation on the broad range of areas that I have been discussing today, in order to secure prosperity and stability in our region.

The deepening of Japan's cooperation with China and the Republic of Korea will also be a significant force in propelling this community. The Trilateral Meeting of the leaders of Japan, China and the Republic of Korea set some wonderful precedents. I would like to highly praise the active role China is willing to play in regional cooperation. With its wealth of human resources and huge economic potential, China will surely make an enormous contribution to regional development. In addition, I would like to express my respect for the Republic of Korea's dynamic initiatives in promoting regional cooperation. I can confirm that the three leaders of Japan, China and the Republic of Korea are resolved to cooperate with each other; because we all know that our trilateral cooperation will make great contribution to prosperity of the region.

An important challenge is strengthening economic partnership in the region. The Initiative for Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership that I mentioned earlier will be an important platform for this purpose. I expect that the ASEAN-China Free Trade Area and moves toward economic partnership between ASEAN and Australia and New Zealand will make similar contributions.

If one considers the specific challenges to be tackled in the region, it is only natural that these countries will deepen their partnerships with each other.

(lanjutan)

Through this cooperation, I expect that the countries of ASEAN, Japan, China, the Republic of Korea, Australia and New Zealand will be core members of such a community.

The community I am proposing should be by no means an exclusive entity. Indeed, practical cooperation in the region would be founded on close partnership with those outside the region. In particular, the role to be played by the United States is indispensable because of its contribution to regional security and the scale of its economic interdependence with the region. Japan will continue to enhance its alliance with the United States. Cooperation with Southwest Asia, including India, is also of importance, as is cooperation with the Pacific nations through APEC, the Asia-Pacific Economic Cooperation group, and with Europe through ASEM, the Asia-Europe Meeting. APEC and ASEM are important tools to link our region to other regions.

Through such efforts, the community I have described can take meaningful actions for regional cooperation. I believe that this in turn will benefit global stability and prosperity.

Let me summarize by using an analogy. I am a great fan of opera. To me, the appeal of opera lies in the fact that a myriad of singers and instruments, each possessed of different qualities of voice and sound, against the backdrop of a grand stage and beautiful costumes, come together in one complete and impressive drama. The community that I have outlined today is exactly such a creation. As we "act together and advance together," let us in concert compose a harmonious community of many voices raised for the greater good.

As was the case with the "letter of friendship" sent in a bottle by the child from Tanegashima, I sincerely hope that my words today will reach each of your hearts and prompt you to join me in creating such a community in this region.

Thank you for inviting me, and thank you for your kind hospitality.